

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
 NOMOR 32 TAHUN 2023
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH
 DAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 – 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
 TAHUN 2024-2026

URUSAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN : 1. Pendidikan
 2. Kebudayaan

TUGAS POKOK : Merumuskan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan meliputi Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Pendidikan Khusus, Guru dan Tenaga Kependidikan, Kebudayaan serta Kesekretariatan.

FUNGSI : a. Perumusan kebijakan strategis dibidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
(1)	(2)		(3)
Tujuan:			
TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS MANUSIA YANG KOMPETITIF, UNGGUL, ANDAL DAN TAQWA (KUAT)			
Sasaran:			
Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan serta derajat kesehatan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	Menggambarkan Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
masyarakat			dibutuhkan informasi: a. Partisipasi sekolah b. Jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki c. Ijasah tertinggi yang dimiliki d. Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki Formula: $MYS = \frac{1}{P_{12+}} \sum_{i=1}^{P_{12+}} (\text{Lama sekolah penduduk ke } - i)$ Sumber data: BPS
	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	Menggambarkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang Formula: $HLS_x^t = FK \times \sum_{i=1}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Sumber data: BPS
	Persentase pemenuhan SPM Pendidikan Menengah	%	Menggambarkan pencapaian SPM Pendidikan Menengah Formula: $= \frac{\text{Jumlah Indikator SPM Pendidikan Menengah yg tercapai}}{\text{Jumlah Indikator SPM Pendidikan Menengah}} \times 100$ Ket.: Sumber Data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTB
	Persentase pemenuhan SPM Pendidikan Khusus	%	Menggambarkan pencapaian SPM Pendidikan Khusus Formula: $= \frac{\text{Jumlah Indikator SPM Pendidikan Khusus yg tercapai}}{\text{Jumlah Indikator SPM Pendidikan Khusus}} \times 100$ Sumber Data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTB
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Nusa Tenggara Barat yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT)	Persentase penduduk dengan tingkat pendidikan menengah/ sederajat	%	Menggambarkan struktur Pendidikan penduduk dengan tingkat Pendidikan menengah/ sederajat ke atas Formula: $= \frac{\text{Jumlah penduduk berpendidikan menengah sederajat ke atas}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$ Sumber Data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTB
	Persentase siswa/ pelajar yang mengikuti pendidikan karakter	%	Menggambarkan siswa yang telah mengikuti Pendidikan karakter dibandingkan dengan jumlah seluruh siswa sekolah Formula: $= \frac{\text{Jumlah siswa yg telah mengikuti pendidikan karakter}}{\text{Jumlah siswa}} \times 100$ Sumber Data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTB
	Persentase siswa yang memiliki sertifikasi kemampuan dan keterampilan bahasa asing (TOEFL/IELTS)	%	Menggambarkan siswa yang tersertifikasi telah memiliki kemampuan dan keterampilan bahasa inggris Formula: $= \frac{\text{Jumlah siswa bersertifikat bahasa inggris}}{\text{Jumlah siswa}} \times 100$ Sumber Data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTB
	Persentase lulusan	%	Menggambarkan Jumlah siswa SMK

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
	SMK yang mendapatkan sertifikasi LSP P1		yang telah tersertifikasi LSP P1 Formula: $= \frac{\text{Jumlah siswa bersertifikat LSP P1}}{\text{Jumlah siswa}} \times 100$ Sumber Data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTB
	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Point	Memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi budaya; (2) dimensi pendidikan; (3) dimensi ketahanan sosial budaya; (4) dimensi warisan budaya; (5) dimensi ekspresi budaya; (6) dimensi budaya literasi; dan (7) dimensi kesetaraan gender. Ketujuh dimensi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan bersifat lintas sektor Formula: $IPK = \sum_{j=1}^7 (W_j \times \text{Indeks } D_j)$ Ket: IPK: Indeks Pembangunan Kebudayaan Dj: Dimensi ke-j Wj: Bobot Dimensi ke-j Sumber data: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tujuan			
TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN YANG LESTARI DAN ASRI			
Sasaran			
Meningkatnya ketahanan iklim dan ketangguhan menghadapi resiko bencana	Persentase sekolah yang melakukan pemilahan sampah sekolah	%	Menggambarkan seberapa banyak sekolah yang telah melakukan proses pemilahan sampah untuk mendukung zero waste Formula: $= \frac{\text{Jumlah sekolah yang telah memilah sampah}}{\text{Jumlah sekolah}} \times 100$ Sumber Data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTB
Tujuan			
TERWUJUDNYA PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH			
Sasaran			
Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Retribusi dan LLPAD)	%	Menggambarkan pertumbuhan pendapatan asli daerah yang bersumber dari jasa Pendidikan (Retribusi dan LLPAD) Formula $= \frac{\text{PAD jasa pendidikan tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{\text{AD jasa pendidikan tahun } t - 1} \times 100$ Sumber Data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTB

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2024-2026

URUSAN : Kesehatan
PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN

TUGAS POKOK : Merumuskan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, advokasi, koordinasi, konsultasi, fasilitasi, sosialisasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, pengawasan, monitoring evaluasi dan pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang kesehatan kegiatan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan serta kesekretariatan.

FUNGSI : a. Perumusan kebijakan strategis dibidang Kesehatan;
b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Kesehatan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Kesehatan;
d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Kesehatan; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS <i>(1)</i>	INDIKATOR KINERJA <i>(2)</i>	SATUAN	PENJELASAN <i>(3)</i>
Tujuan			
TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS MANUSIA YANG KOMPETITIF, UNGGUL, ANDAL DAN TAQWA (KUAT)			
Sasaran			
Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan serta derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	Menggambarkan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya Formula: Dihitung berdasarkan Angka Kematian menurut umur Sumber data: BPS
	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	Menggambarkan kejadian kematian ibu yang terkait dengan kehamilan, persalinan, dan nifas setiap 100.000 kelahiran hidup Formula: $= \frac{\text{Jumlah Kematian Ibu}}{\text{Jumlah Kelahiran Hidup}} \times 100.000 \text{ KH}$ Sumber data: Dinas Kesehatan
	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1000 KH	Menggambarkan banyaknya kematian bayi usia dibawah

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
			<p>satu tahun, setiap 1.000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu</p> <p>Formula: $= \frac{\text{Jumlah Kematian Bayi}}{\text{Jumlah Kelahiran Hidup}} \times 1.000 \text{ KH}$ </p> <p>Sumber data: Dinas Kesehatan</p>
	Persentase pemenuhan SPM Pelayanan kesehatan bagi penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpostensi bencana daerah provinsi	%	<p>Menggambarkan pencapaian SPM Pelayanan kesehatan bagi penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpostensi bencana daerah provinsi</p> <p>Formula: $= \frac{\text{Jumlah Indikator SPM Kesehatan 1 yg tercapai}}{\text{Jumlah Indikator SPM Kesehatan 1}} \times 100$ </p> <p>Ket.: SPM Kesehatan 1: SPM Pelayanan kesehatan bagi penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpostensi bencana daerah provinsi</p> <p>Sumber data: Dinas Kesehatan Prov. NTB</p>
	Persentase pemenuhan SPM Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB daerah provinsi	%	<p>Menggambarkan pencapaian SPM Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB daerah provinsi</p> <p>Formula: $= \frac{\text{Jumlah Indikator SPM Kesehatan 2 yg tercapai}}{\text{Jumlah Indikator SPM Kesehatan 2}} \times 100$ </p> <p>Ket.: SPM Kesehatan 2: SPM Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB daerah provinsi</p> <p>Sumber data: Dinas Kesehatan Prov. NTB</p>
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Nusa Tenggara Barat yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT)	Persentase keluarga sehat pada setiap posyandu keluarga	%	<p>Menggambarkan besaran keluarga sehat yang dalam setiap posyandu keluarga</p> <p>Formula: $= \frac{\text{Jumlah keluarga sehat pada posyandu keluarga}}{\text{Jumlah keluarga pada posyandu keluarga}} \times 100$ </p> <p>Sumber data: Dinas Kesehatan Prov. NTB</p>
	Persentase Balita Stunting (e-PPBGM)	%	<p>Menggambarkan besaran balita yang mengalami kondisi stunting</p> <p>Formula: dihitung berdasarkan survei yang dilakukan dengan aplikasi e-PPBGM</p> <p>Sumber data: Dinas Kesehatan Prov. NTB (e-</p>

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
			PPBGM)
	Persentase sanitasi layak	%	Menggambarkan besaran rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan Formula: $= \frac{JRTSL}{JRTS} \times 100$ Ket.: JRTSL: Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi layak JRTS: Jumlah rumah tangga seluruhnya Sumber data: Dinas Kesehatan Prov. NTB

Tujuan

TERWUJUDNYA PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH

Sasaran

Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Rumah Sakit Mandalika (Retribusi)	%	Menggambarkan pertumbuhan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pelayanan kesehatan (Retribusi) pada RS Mandalika Formula $= \frac{PAD \text{ tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{PAD \text{ tahun } t - 1} \times 100$ Sumber Data: RS Mandalika
	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi (LLPAD)	%	Menggambarkan pertumbuhan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pelayanan kesehatan (LLPAD) pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Formula $= \frac{PAD \text{ tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{PAD \text{ tahun } t - 1} \times 100$ Sumber Data: Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi
	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Rumah Sakit Mata (LLPAD)	%	Menggambarkan pertumbuhan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pelayanan kesehatan (LLPAD) pada Rumah Sakit Mata Formula $= \frac{PAD \text{ tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{PAD \text{ tahun } t - 1} \times 100$ Sumber Data: Rumah Sakit Mata
	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Rumah Sakit Umum Provinsi (LLPAD)	%	Menggambarkan pertumbuhan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pelayanan kesehatan (LLPAD) pada Rumah Sakit Umum Provinsi

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
			Formula $= \frac{PAD \text{ tahun } t - (tahun \ t - 1)}{PAD \text{ tahun } t - 1} \times 100$ Sumber Data: Rumah Sakit Umum Provinsi
	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma (LLPAD)	%	Menggambarkan pertumbuhan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pelayanan kesehatan (LLPAD) pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Formula $= \frac{PAD \text{ tahun } t - (tahun \ t - 1)}{PAD \text{ tahun } t - 1} \times 100$ Sumber Data: Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma
	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Rumah Sakit Manambai (LLPAD)	%	Menggambarkan pertumbuhan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pelayanan kesehatan (LLPAD) pada Rumah Sakit Manambai Formula $= \frac{PAD \text{ tahun } t - (tahun \ t - 1)}{PAD \text{ tahun } t - 1} \times 100$ Sumber Data: Rumah Sakit Manambai

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2024-2026

URUSAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

TUGAS POKOK : Merumuskan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kegiatan Sumberdaya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Tata Ruang dan Bina Jasa Kontruksi serta Kesekretariatan.

FUNGSI :

- a. Perumusan kebijakan strategis dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
(1)	(2)		(3)
Tujuan			
TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN YANG LESTARI DAN ASRI			
Sasaran			
Meningkatnya kualitas ekosistem darat, laut dan udara	Persentase sanitasi aman	%	Menggambarkan akses terhadap fasilitas sanitasi yang dimiliki oleh rumah tangga, yang terhubung dengan septic tank dengan tetap dilakukan pemeliharaan secara berkala. Formula: $= \frac{JRTSIPLT}{JRTS} \times 100$ Ket.: JRTSIPLT: Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi layak dan disedot minimal sekali dalam kurun 5 tahun JRTS: Jumlah rumah tangga seluruhnya Sumber data: Dinas PUPR Prov. NTB
	Persentase pemenuhan SPM	%	Menggambarkan pencapaian SPM Pelayanan Pemenuhan

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
	Pelayanan Pemenuhan Kebutuhan Air minum curah lintas kab/kota		Kebutuhan Air minum curah lintas kab/kota Formula: $= \frac{\text{Jumlah Indikator SPM PUPR 1 yg tercapai}}{\text{Jumlah Indikator SPM PUPR 1}} \times 100$ Ket.: SPM PUPR1: SPM Pelayanan Pemenuhan Kebutuhan Air minum curah lintas kab/kota Sumber data: Dinas PUPR Prov. NTB
	Persentase pemenuhan SPM Pelayanan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kab/kota	%	Menggambarkan pencapaian SPM Pelayanan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kab/kota Formula: $= \frac{\text{Jumlah Indikator SPM PUPR 2 yg tercapai}}{\text{Jumlah Indikator SPM PUPR 2}} \times 100$ Ket.: SPM PUPR 2: SPM Pelayanan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kab/kota Sumber data: Dinas PUPR Prov. NTB
	Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	Menggambarkan kondisi sistem irigasi yang ada Formula: $= \frac{\text{Jumlah sistem irigasi yang baik}}{\text{Jumlah sistem irigasi yang ada}} \times 100$ Sumber data: Dinas PUPR Prov. NTB

Tujuan

TERWUJUDNYA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH

Sasaran

Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan strategis, kawasan transmigrasi dan perdesaan, mendorong investasi dan percepatan industrialisasi	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	Menggambarkan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana peruntukkannya Formula: $= \frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana Peruntukan}} \times 100\%$ Sumber data: Dinas PUPR Prov. NTB
	Realisasi pembangunan infrastruktur dasar pada kawasan strategis	%	Menggambarkan tingkat pembangunan infrastruktur dasar yang dilakukan pada Kawasan strategis Formula: $= \frac{\text{Jumlah infrastruktur dasar yang dibangun di KS}}{\text{Jumlah infrastruktur dasar yang harus ada di KS}} \times 100$ Ket.: KS: Kawasan Strategis Sumber data: Dinas PUPR Prov. NTB

Tujuan

TERWUJUDNYA TRANSFORMASI EKONOMI MELALUI PENINGKATAN

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
PRODUKTIVITAS DAERAH MENUJU NTB SEBAGAI LOKOMOTIF PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL BALI DAN NUSA TENGGARA YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN			
Sasaran			
Meningkatnya lapangan kerja dan produktivitas daerah	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Konstruksi	%	Menggambarkan pertumbuhan produktivitas pada sektor konstruksi pada PDRB NTB Formula: $= \frac{PDRB \text{ Sektor } k \text{ tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{PDRB \text{ Sektor } k \text{ tahun } t - 1} \times 100$ Ket.: PDRB sektor k: PDRB sektor konstruksi Sumber data: BPS Prov. NTB
Tujuan			
TERWUJUDNYA PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH			
Sasaran			
Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dinas PUPR (Retribusi)	%	Menggambarkan pertumbuhan pendapatan asli daerah yang bersumber dari Dinas PUPR (Retribusi) Formula $= \frac{PAD \text{ tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{PAD \text{ tahun } t - 1} \times 100$ Sumber data: Dinas PUPR Prov. NTB

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2024-2026

URUSAN : Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN

TUGAS POKOK : Merumuskan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman kegiatan Perumahan, Pemukiman, Pengendalian dan Pengembangan perumahan Pemukiman, dan Kerjasama pembangunan Perumahan dan Pemukiman serta Kesekretariatan.

FUNGSI : a. Perumusan kebijakan strategis dibidang Perumahan dan Pemukiman;
b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Perumahan dan Pemukiman;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Perumahan dan Pemukiman;
d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Perumahan dan Pemukiman; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
(1)	(2)		(3)
Tujuan			
TERWUJUDNYA KUALITAS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG MANDIRI			
Sasaran			
Meningkatnya pemerataan pendapatan serta kesejahteraan lahiriah (fisik) dan rohaniah (non fisik)	Persentase pembangunan Rumah layak huni (RLH)	%	Menggambarkan rumah layak huni dibandingkan dengan jumlah rumah pada suatu wilayah tertentu Formula: $= \frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{jumlah rumah di suatu wilayah tertentu}} \times 100\%$ Sumber data: Dinas Perumahan dan Permukiman Prov. NTB
	Persentase pemenuhan SPM Penyediaan dan Rehabilitasi rumah bagi korban bencana Provinsi	%	Menggambarkan SPM Penyediaan dan Rehabilitasi rumah bagi korban bencana Provinsi Formula: $= \frac{\text{Jumlah Indikator SPM Perkim 1 yg tercapai}}{\text{Jumlah Indikator SPM Perkim 1}} \times 100$ Ket.: SPM Perkim 1: SPM Penyediaan dan Rehabilitasi rumah bagi korban bencana

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
			Provinsi Sumber data: Dinas Perumahan dan Permukiman Prov. NTB
	Persentase pemenuhan SPM Fasilitas Penyediaan bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi	%	Menggambarkan pemenuhan SPM Fasilitas Penyediaan bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi Formula: $= \frac{\text{Jumlah Indikator SPM Perkim 2 yg tercapai}}{\text{Jumlah Indikator SPM Perkim 2}} \times 100$ Ket.: SPM Perkim 2: pemenuhan SPM Fasilitas Penyediaan bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi Sumber data: Dinas Perumahan dan Permukiman Prov. NTB
Tujuan			
TERWUJUDNYA TRANSFORMASI EKONOMI MELALUI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAERAH MENUJU NTB SEBAGAI LOKOMOTIF PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL BALI DAN NUSA TENGGARA YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN			
Sasaran			
Meningkatnya lapangan kerja dan produktivitas daerah	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Real Estate	%	Menggambarkan pertumbuhan produktivitas pada sektor Real Estate pada PDRB NTB Formula: $= \frac{\text{PDRB Sektor RE tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{\text{PDRB Sektor RE tahun } t - 1} \times 100$ Ket.: PDRB sektor RE: PDRB sektor Real Estate Sumber data: BPS Prov. NTB
Meningkatnya kemadirian fiskal daerah	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada dinas perumahan dan permukiman (retribusi)	%	

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2024-2026

URUSAN : Sosial
PEMERINTAH YANG
DILAKSANAKAN

TUGAS POKOK : Merumuskan bahan/materi penyusunan kebijakan strategis, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, rencana/program, pelaksanaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibidang Sosial kegiatan Perlindungan dan Jaminan sosial, Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Penanganan Fakir Miskin dan Kesekretariatan.

FUNGSI : a. Perumusan kebijakan strategis dibidang Sosial;
b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Sosial;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Sosial;
d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Sosial; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
(1)	(2)		(3)
Tujuan			
TERWUJUDNYA KUALITAS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG MANDIRI			
Sasaran			
Meningkatnya pemerataan pendapatan serta kesejahteraan lahiriah (fisik) dan rohaniyah (non fisik)	Indeks Kesejahteraan Sosial	Kategori	Menggambarkan capaian pembangunan Kesejahteraan Sosial Formula: Sumber data: N/A
	Jumlah Kemiskinan ekstrem	%	Menggambarkan kondisi Penduduk Miskin yang berada pada desil 1, 2, dan 3 Formula: $= \frac{\text{Jumlah penduduk miskin ekstrem yang tertangani}}{\text{Jumlah Penduduk miskin ekstrem}} \times 100$ Menjumlahkan penduduk miskin yang ada pada desil 1, desil 2, dan desil 3. Sumber data: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
	Persentase pelayanan kepada kelompok rentan/disabilitas	%	Menggambarkan besaran pelayanan terhadap kelompok rentan/disabilitas Formula: $= \frac{\text{Jumlah penduduk rentan atau dasbilitas yg dilayani}}{\text{Jumlah penduduk rentan atau dasbilitas}} \times 100$ Sumber data: Dinas Sosial Prov. NTB

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
	Persentase pemenuhan SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	%	Menggambarkan pemenuhan SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Formula: $= \frac{\text{Jumlah Indikator SPM Sosial 1 yg tercapai}}{\text{Jumlah Indikator SPM Sosial 1}} \times 100$ Ket.: SPM Sosial 1: pemenuhan SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Sumber data: Dinas Sosial Prov. NTB
	Persentase pemenuhan SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	%	Menggambarkan SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Formula: $= \frac{\text{Jumlah Indikator SPM Sosial 2 yg tercapai}}{\text{Jumlah Indikator SPM Sosial 2}} \times 100$ Ket.: SPM Sosial 2: SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Sumber data: Dinas Sosial Prov. NTB
	Persentase pemenuhan SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia di dalam Panti	%	Menggambarkan pemenuhan SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia di dalam Panti Formula: $= \frac{\text{Jumlah Indikator SPM Sosial 3 yg tercapai}}{\text{Jumlah Indikator SPM Sosial 3}} \times 100$ Ket.: SPM Sosial 3: pemenuhan SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia di dalam Panti Sumber data: Dinas Sosial Prov. NTB
	Persentase pemenuhan SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	%	Menggambarkan pemenuhan SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Formula: $= \frac{\text{Jumlah Indikator SPM Sosial 4 yg tercapai}}{\text{Jumlah Indikator SPM Sosial 4}} \times 100$ Ket.: SPM Sosial 4: SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sumber data: Dinas Sosial Prov. NTB
	Persentase pemenuhan SPM Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	Menggambarkan pemenuhan SPM Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
	Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi		<p>Bencana Provinsi</p> <p>Formula:</p> $= \frac{\text{Jumlah Indikator SPM Sosial 5 yg tercapai}}{\text{Jumlah Indikator SPM Sosial 5}} \times 100$ <p>Ket.:</p> <p>SPM Sosial 5: pemenuhan SPM Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi</p> <p>Sumber data: Dinas Sosial Prov. NTB</p>
Tujuan			
TERWUJUDNYA PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH			
Sasaran			
Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dinas Sosial (Retribusi)	%	<p>Menggambarkan pertumbuhan pendapatan asli daerah yang bersumber dari Dinas Sosial (Retribusi)</p> <p>Formula</p> $= \frac{\text{PAD tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{\text{PAD tahun } t - 1} \times 100$ <p>Sumber data: Dinas Sosial Prov. NTB</p>

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2024-2026

URUSAN : 1. Tenaga Kerja
PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN : 2. Transmigrasi

TUGAS POKOK : Memimpin, melakukan koordinasi, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang merupakan urusan pemerintahan provinsi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI : a. Perumusan kebijakan teknis, strategi, dan perencanaan strategis urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
c. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
d. Perumusan penyusunan Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB dengan memberikan arahan kepada Sekretaris, Kepala Bidang dan kepala UPTD;
e. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil yang dicapai, ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier; dan
f. Melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – perundangan yang berlaku.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
(1)	(2)		(3)
Tujuan			
TERWUJUDNYA KUALITAS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG MANDIRI			
Sasaran			
Meningkatnya pemerataan pendapatan serta kesejahteraan lahiriah (fisik) dan rohaniah (non fisik)	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	Point	menggambarkan kondisi keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan secara komposit yang mencakup 9 (sembilan) indikator utama pembangunan ketenagakerjaan yang sangat mendasar, seperti Perencanaan Tenaga Kerja, Penduduk dan Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja, Pelatihan dan Kompetensi Kerja,

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
			Produktivitas Tenaga Kerja, Hubungan Industrial, Kondisi Lingkungan Kerja, Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja, serta Jaminan Sosial Tenaga Kerja Formula: Dihitung oleh kementerian ketenagakerjaan dengan mempertimbangkan 9 indikator di atas Sumber data: Kementerian Ketenagakerjaan RI
	Persentase transmigran yang sejahtera dan mandiri	%	Menggambarkan kondisi kesejahteraan transmigran Formula $= \frac{\text{Jumlah transmigran yang telah mandiri}}{\text{Jumlah transmigran}} \times 100$ Sumber data: Dinas Tenaga Kerja Prov. NTB
Meningkatnya perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial dan inklusi keuangan	Persentase peningkatan upah kerja (UMP)	%	Menggambarkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) setiap tahun Formula: $= \frac{\text{UMP tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{\text{UMP tahun } t - 1} \times 100$ Sumber data: Dinas Tenaga Kerja Prov. NTB
	Persentase peningkatan remittance	%	Menggambarkan kenaikan remittance yang masuk ke wilayah NTB setiap tahun Formula: $= \frac{\text{Remittance tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{\text{remittance tahun } t - 1} \times 100$ Sumber data: BPS, diolah
	Persentase peningkatan penyediaan lapangan kerja melalui job fair	%	Menggambarkan kondisi penyediaan lapangan kerja melalui yang dilakukan dengan job fair setiap tahun Formula: $= \frac{\text{Lapangan kerja tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{\text{Lapangan kerja tahun } t - 1} \times 100$ Sumber data: Dinas Tenaga Kerja Prov. NTB
Tujuan			
TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS MANUSIA YANG KOMPETITIF, UNGGUL, ANDAL DAN TAQWA (KUAT)			
Sasaran			
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Nusa Tenggara Barat yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT)	Persentase pencari kerja yang bersertifikat keahlian	%	Menggambarkan kondisi tenaga kerja yang memiliki keahlian yang ditunjukkan dengan sertifikat keahlian Formula: $= \frac{\text{Jumlah Angkatan kerja bersertifikat keahlian}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100$ Sumber data: Dinas Tenaga Kerja Prov. NTB
Tujuan			
TERWUJUDNYA PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH			
Sasaran			
Meningkatnya	Persentase	%	Menggambarkan pertumbuhan

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
kemandirian fiskal daerah	peningkatan penerimaan PAD pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Retribusi)		pendapatan asli daerah yang bersumber dari Dinas Tenaga Kerja (Retribusi) Formula $= \frac{PAD \text{ tahun } t - (tahun \ t - 1)}{PAD \text{ tahun } t - 1} \times 100$ <p>Sumber data: Dinas Tenaga Kerja Prov. NTB</p>
Tujuan			
TERWUJUDNYA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH			
Sasaran			
Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan strategis, kawasan transmigrasi dan perdesaan, mendorong investasi dan percepatan industrialisasi	Persentase satuan permukiman transmigrasi yang dikembangkan	%	Menggambarkan kondisi pengembangan permukiman transmigrasi Formula: $= \frac{Jumlah \ pemukiman \ transmigrasi \ yg \ dikembangkan}{Jumlah \ pemukiman \ transmigrasi} \times 100$ <p>Sumber data: Dinas Tenaga Kerja Prov. NTB</p>

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2024-2026

URUSAN : 1. Pemberdayaan Masyarakat Desa
 PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN : 2. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

TUGAS POKOK : Merumuskan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengkajian, analisis, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi, pelaporan penyelenggaraan pemerintahan dibidang Kelembagaan dan Sosial Budaya, Pemerintahan Desa, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kependudukan dan Catatan Sipil serta Kesekretariatan.

FUNGSI : a. Perumusan kebijakan strategis dibidang Pemberdayaan masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil;
 b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Pemberdayaan masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil;
 c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pemberdayaan masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil;
 d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Pemberdayaan masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil; dan
 e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
(1)	(2)		(3)
Tujuan			
TERWUJUDNYA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH			
Sasaran			
Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan strategis, kawasan transmigrasi dan perdesaan, mendorong investasi dan percepatan industrialisasi	Persentase perekaman KTP	%	Menggambarkan kondisi penduduk wajib KTP yang telah melakukan perekaman eKTP Formula: $= \frac{\text{Jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP}} \times 100$ Sumber data: DPMPD dan Capil Prov. NTB
	Rasio Penduduk BerKTP Persatuan Penduduk	%	Menggambarkan kondisi penduduk yang telah memiliki KTP sebagai identitas resmi Formula: $= \frac{\text{Jumlah penduduk yang telah memiliki KTP}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP}} \times 100$ Sumber data: DPMPD dan Capil

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
	Persentase desa mandiri dan maju	%	Prov. NTB Mengambarkan kondisi tingkat kemajuan suatu desa dalam membangun sumber daya manusia dan ekonomi local Formula: Dihitung dan dirilis langsung oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Sumber data: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2024-2026

- URUSAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN** : 1. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 2. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- TUGAS POKOK** : Merumuskan bahan/materi kebijakan, rencana/ program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengkajian, analisis, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi, pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan urusan pemerintahan dibidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana kegiatan Kualitas Hidup Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Perempuan, Perlindungan Khusus Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Kesekretariatan.
- FUNGSI** : a. Perumusan kebijakan strategis dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
 e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
(1)	(2)		(3)
Tujuan			
TERWUJUDNYA KUALITAS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG MANDIRI			
Sasaran			
Meningkatnya pemerataan pendapatan serta kesejahteraan lahiriah (fisik) dan rohaniyah (non fisik)	Indeks pembangunan gender	point	Menggambarkan kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan Formula: Perhitungan dilakukan oleh BPS dengan menggunakan instrumen seperti IPM. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG Sumber data: BPS
	Indeks pemberdayaan	point	Menggambarkan pencapaian pemberdayaan gender di suatu

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
	gender		wilayah Formula: Dihitung BPS menggunakan Instrumen seperti Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG Sumber data: BPS
	Rata-rata Usia Perkawinan Pertama Perempuan	tahun	Menggambarkan secara rata-rata umur pertama menikah yang berarti juga saat dimulainya masa reproduksinya pembuahan Formula: $\text{Rata-rata UKP} = \frac{\sum_{i=1}^n U_i}{n}$ Ket.: U _i = umur perkawinan pertama wanita ke-i n = jumlah wanita menurut perkawinan pertama Sumber data: BPS
	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	Menggambarkan tingkat partisipasi perempuan dalam proses pembangunan daerah Formula: rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. Sumber data: BPS
	Cakupan Kab/kota yang mendapat penghargaan KLA tingkat madya dan nindya	%	Menggambarkan kondisi Kabupaten/Kota yang telah mendapat predikat kota layak anak tingkat madya dan nindya Formula: $= \frac{\text{Jumlah kab, kota berpredikat madya dan nindya}}{\text{Jumlah Kab, Kota}} \times 100$ Sumber data: DP3AP2KB Prov. NTB
	Pertumbuhan penduduk (%)	%	Menggambarkan tingkat pertumbuhan penduduk setiap tahunnya Formula: $= \frac{\text{Jumlah Penduduk tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{\text{Jumlah Penduduk tahun } t - 1} \times 100$ Sumber data: BPS

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
	mCPR (modern Contraceptive Prevalence Rate): PUS yang menggunakan alat kontrasepsi modern	%	<p>Menggambarkan Pasangan usia subur yang telah menggunakan kontrasepsi modern</p> <p>Formula:</p> $= \frac{\text{Jumlah PUS pengguna kontrasepsi modern}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100$ <p>Sumber data: BKKBN</p>

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2024-2026

URUSAN : Pangan
PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN

TUGAS POKOK : Merumuskan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Ketahanan Pangan kegiatan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan, Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi dan Distribusi Pangan, Diversifikasi dan Keamanan Pangan.

FUNGSI : a. Perumusan kebijakan strategis dibidang Ketahanan Pangan;
b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Ketahanan Pangan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Ketahanan Pangan;
d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Ketahanan Pangan; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS (1)	INDIKATOR KINERJA (2)	SATUAN	PENJELASAN (3)
Tujuan			
TERWUJUDNYA KUALITAS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG MANDIRI			
Sasaran			
Meningkatnya pemerataan pendapatan serta kesejahteraan lahiriah (fisik) dan rohaniah (non fisik)	Indeks Ketahanan Pangan	point	Menggambarkan kondisi ketahanan pangan secara umum pada suatu wilayah. Formula: $Y(j) = \sum_{i=1}^9 a_i X_{ij}$ Ket: i: Indikator 1, ..., 9 j: Kabupaten 1, 2,; Kota 1, 2, Yj: Indeks Ketahanan Pangan kabupaten/kota ke-j ai: Bobot masing-masing indikator ke-i Xij: Nilai standarisasi masing-masing indikator ke-i pada kabupaten/kota ke-j Sumber data: Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian RI
	Persentase konsumsi komoditi makanan terhadap total pengeluaran penduduk miskin	%	Menggambarkan besaran konsumsi komoditi makanan dari total pendapatan penduduk miskin Formula: $= \frac{\text{Jumlah konsumsi komoditi makanan penduduk miskin}}{\text{Jumlah pendapatan penduduk miskin}} \times 100$

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
			Sumber data: BPS Prov. NTB
	Persentase konsumsi komoditi bukan makanan terhadap total pengeluaran penduduk miskin	%	Menggambarkan besaran konsumsi komoditi non makanan dari total pendapatan penduduk miskin Formula: $= \frac{\text{Jumlah konsumsi komoditi non makanan penduduk miskin}}{\text{Jumlah pendapatan penduduk miskin}} \times 100$
	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	point	Menggambarkan kualitas keberagaman konsumsi pangan masyarakat Formula: Skor PPH = % angka kecukupan protein (AKP) di kali dengan bobot masing-masing kelompok pangan. Ket.: *AKP yang dijadikan dasar perhitungan sebesar 57 gr/kap/hari berdasarkan kesepakatan Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi X Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2024-2026

URUSAN : 1. Lingkungan Hidup
 PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN : 2. Kehutanan

TUGAS POKOK : Merumuskan bahan/materi penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, monitoring, perumusan dan penyusunan rencana/program, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan kegiatan Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Pencemaran, Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup, Planologi dan Pemanfaatan Hutan, Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam , Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat serta Kesekretariatan.

FUNGSI : a. Perumusan kebijakan strategis dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 c. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
(1)	(2)		(3)
Tujuan			
TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN YANG LESTARI DAN ASRI			
Sasaran			
Meningkatnya kualitas ekosistem darat, laut dan udara	Indeks Kualitas Air	point	Menggambarkan kondisi air dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi dan biologisnya Formula: $IKA = ((\text{Status mutu Lokasi 1} \times \text{bobot pencemaran}) + \dots + (\text{Status mutu Lokasi n} \times \text{bobot pencemaran}))$ Sumber data: Kementerian LHK
	Indeks Kualitas Udara	point	Menggambarkan kondisi kualitas udara di suatu tempat Formula:

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
			$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} (J_{SU} - 0,1) \right)$ $I_{EU} = \frac{\text{Indeks NO}_2 + \text{Indeks SO}_2}{2}$ $\text{Indeks NO}_2 = \frac{\text{Rata - rata NO}_2}{\text{Baku Mutu } E_u}$ $\text{Indeks SO}_2 = \frac{\text{Rata - rata SO}_2}{\text{Baku Mutu } E_u}$ <p>Sumber data: Kementerian LHK</p>
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	point	<p>Rekapitulasi luas hutan primer dan hutan sekunder untuk setiap provinsi</p> <p>Formula:</p> $IKTL = 100 - \left((84,3 - (TL \times 100)) \times \frac{50}{54,3} \right)$ <p>Ket: TL: Tutupan Lahan</p> <p>Sumber data: Kementerian LHK</p>
Meningkatnya ketahanan iklim dan ketangguhan menghadapi resiko bencana	Persentase implementasi program pengurangan emisi dari aksi mitigasi sektor/sub sektor Energi/pembangkit, Transportasi, Bangunan, Limbah padat, Limbah cair, Sampah, Industri, Persawahan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Blue carbon	%	<p>Menggambarkan besaran jumlah sektor/subsektor (12 sektor/sub sektor) yang menjadi sasaran implementasi program pengurangan emisi dari aksi mitigasi</p> <p>Formula:</p> $= \frac{\text{Jumlah sektor implementasi aksi mitigasi}}{\text{Jumlah sektor aksi mitigasi}} \times 100$ <p>Sumber data: Dinas LHK Prov. NTB</p>
	Persentase implementasi program pengurangan emisi dari aksi adaptasi dalam bidang Pangan, Air, Energi, Kesehatan, Ekosistem	%	<p>Menggambarkan besaran jumlah sektor/subsektor (5 sektor/sub sektor) yang menjadi sasaran implementasi program pengurangan emisi dari aksi adaptasi</p> <p>Formula:</p> $= \frac{\text{Jumlah sektor implementasi aksi adaptasi}}{\text{Jumlah sektor aksi adaptasi}} \times 100$ <p>Sumber data: Dinas LHK Prov. NTB</p>
	Persentase pengurangan dan penanganan sampah	%	<p>Memberikan gambaran jumlah sampah yang dapat ditangani, dan pengurangan jumlah sampah yang dilakukan (Bank Sampah, pengelola sampah dsb)</p> <p>Formula:</p> $= \frac{\text{Jumlah sampah yang ditangani dan dikurangi}}{\text{Jumlah Sampah}} \times 100$ <p>Sumber data: Dinas LHK Prov.</p>

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
			NTB
	Pemilahan sampah rumah tangga	%	Menggambarkan jumlah Rumah Tangga yang telah melakukan pemilahan sampah Formula: $= \frac{\text{Jumlah Rumah Tangga yg telah memilah sampah}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100$ Sumber data: Dinas LHK Prov. NTB
	Pemilahan sampah perkantoran	%	Menggambarkan jumlah Perkantoran yang telah melakukan pemilahan sampah Formula: $= \frac{\text{Jumlah Perkantoran yg telah memilah sampah}}{\text{Jumlah Perkantoran}} \times 100$ Sumber data: Dinas LHK Prov. NTB
	Pemilahan sampah area publik	%	Menggambarkan area publik yang telah melakukan pemilahan sampah Formula: $= \frac{\text{Jumlah area publik yg telah memilah sampah}}{\text{Jumlah area publik}} \times 100$ Sumber data: Dinas LHK Prov. NTB
	Persentase penanganan lahan kritis	%	Menggambarkan penganganan lahan kritis Formula: $= \frac{\text{luas lahan kritis yang tertangani}}{\text{Luas lahan kritis}} \times 100$ Sumber data: Dinas LHK Prov. NTB
	Persentase pemulihan sumber-sumber mata air yang telah hilang	%	Menggambarkan tingkat pemulihan sumber air/mata ir yang telah hilang Formula: $= \frac{\text{Sumber mata air yang dipulihkan}}{\text{Sumber mata air yang telah hilang}} \times 100$ Sumber data: Dinas LHK Prov. NTB
	Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging	%	Menggambarkan tingkat penyelesaian kasus illegal logging Formula: $= \frac{\text{Jumlah kasus illegal logging yang diselesaikan}}{\text{Jumlah kasus illegal logging}} \times 100$ Sumber data: Dinas LHK Prov. NTB

Tujuan

TERWUJUDNYA TRANSFORMASI EKONOMI MELALUI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAERAH MENUJU NTB SEBAGAI LOKOMOTIF PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL BALI DAN NUSA TENGGARA YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN

Sasaran

Meningkatnya lapangan kerja dan produktivitas daerah	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	%	Menggambarkan pertumbuhan produktivitas pada sektor sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang pada PDRB NTB Formula:
--	---	---	---

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
	dan Daur Ulang		$= \frac{PDRB \text{ Sektor AS tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{PDRB \text{ Sektor AS tahun } t - 1} \times 100$ Ket.: PDRB sektor AS: PDRB sektor sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Sumber data: BPS Prov. NTB
	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu	%	Menggambarkan pertumbuhan produktivitas pada sub sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu pada PDRB NTB Formula: $= \frac{PDRB \text{ Sub Sektor HK tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{PDRB \text{ Sub Sektor HK tahun } t - 1} \times 100$ Ket.: PDRB sektor HK: PDRB sub sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu Sumber data: BPS Prov. NTB
Tujuan			
TERWUJUDNYA KUALITAS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG MANDIRI			
Sasaran			
Meningkatnya pemerataan pendapatan serta kesejahteraan lahiriah (fisik) dan rohaniah (non fisik)	Persentase desa mandiri (keluar dari kantong kemiskinan) di sekitar lingkaran hutan	%	Menggambarkan kondisi desa lingkaran hutan Formula: $= \frac{\text{Jumlah desa lingkaran hutan yg tergolong mandiri}}{\text{Jumlah desa lingkaran hutan}} \times 100$ Sumber data: Dinas LHK Prov. NTB
Tujuan			
TERWUJUDNYA PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH			
Sasaran			
Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada DLHK (Retribusi dan LLPAD)	%	Menggambarkan pertumbuhan pendapatan asli daerah yang bersumber dari Dinas LHK Prov. NTB (Retribusi dan LLPAD) Formula: $= \frac{PAD \text{ tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{PAD \text{ tahun } t - 1} \times 100$ Sumber data: Dinas LHK Prov. NTB

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2024-2026

URUSAN : Perhubungan
PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN

TUGAS POKOK : Merumuskan bahan/materi penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, fasilitasi, monitoring, perumusan dan penyusunan rencana/program, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Perhubungan kegiatan Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Pelayaran serta Kesekretariatan.

FUNGSI : a. Perumusan kebijakan strategis dibidang Perhubungan;
b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Perhubungan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Perhubungan;
d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Perhubungan; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS (1)	INDIKATOR KINERJA (2)	SATUAN	PENJELASAN (3)
Tujuan			
TERWUJUDNYA TRANSFORMASI EKONOMI MELALUI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAERAH MENUJU NTB SEBAGAI LOKOMOTIF PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL BALI DAN NUSA TENGGARA YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN			
Sasaran			
Meningkatnya lapangan kerja dan produktivitas daerah	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Transportasi dan Pergudangan	%	Menggambarkan pertumbuhan produktivitas pada sektor Transportasi dan Pergudangan pada PDRB NTB Formula: $= \frac{PDRB \text{ Sektor TP tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{PDRB \text{ Sektor TP tahun } t - 1} \times 100$ Ket.: PDRB sektor TP: PDRB sektor Transportasi dan Pergudangan Sumber data: BPS Prov. NTB
	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor Angkutan Darat	%	Menggambarkan pertumbuhan produktivitas pada sub sektor Angkutan Darat pada PDRB NTB Formula: $= \frac{PDRB \text{ Sub Sektor AD tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{PDRB \text{ Sub Sektor AD tahun } t - 1} \times 100$ Ket.: PDRB sektor AD: PDRB sub sektor Angkutan Darat Sumber data: BPS Prov. NTB
	Produktivitas lapangan usaha	%	Menggambarkan pertumbuhan produktivitas

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
	ekonomi sub sektor Angkutan Laut		pada sub sektor Angkutan Laut pada PDRB NTB Formula: $= \frac{PDRB \text{ Sub Sektor AL tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{PDRB \text{ Sub Sektor AL tahun } t - 1} \times 100$ Ket.: PDRB sektor AL: PDRB sub sektor Angkutan Laut Sumber data: BPS Prov. NTB
	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	%	Menggambarkan pertumbuhan produktivitas pada sub sektor Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan pada PDRB NTB Formula: $= \frac{PDRB \text{ Sub Sektor ASDP tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{PDRB \text{ Sub Sektor ASDP tahun } t - 1} \times 100$ Ket.: PDRB sektor ASDP: PDRB sub sektor Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Sumber data: BPS Prov. NTB
	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor Angkutan Udara	%	Menggambarkan pertumbuhan produktivitas pada sub sektor Angkutan Udara pada PDRB NTB Formula: $= \frac{PDRB \text{ Sub Sektor AU tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{PDRB \text{ Sub Sektor AU tahun } t - 1} \times 100$ Ket.: PDRB sektor AU: PDRB sub sektor Angkutan Udara Sumber data: BPS Prov. NTB
	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	%	Menggambarkan pertumbuhan produktivitas pada sub sektor Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir pada PDRB NTB Formula: $= \frac{PDRB \text{ Sub Sektor PJ tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{PDRB \text{ Sub Sektor PJ tahun } t - 1} \times 100$ Ket.: PDRB sektor PJ: PDRB sub sektor Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir Sumber data: BPS Prov. NTB

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2024-2026

URUSAN : 1. Komunikasi dan Informatika
 PEMERINTAH YANG : 2. Statistik
 DILAKSANAKAN : 3. Persandian

TUGAS POKOK : Merumuskan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Informasi dan Komunikasi Publik, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Persandian dan Keamanan Informasi, Statistik serta Kesekretariatan.

FUNGSI : a. Perumusan kebijakan strategis dibidang Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 c. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 d. Pelaksanaan administrasi dinas dan Pembinaan dibidang Komunikasi, Informatika dan Statistik; dan
 e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
(1)	(2)		(3)
Tujuan			
TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS MANUSIA YANG KOMPETITIF, UNGGUL, ANDAL DAN TAQWA (KUAT)			
Sasaran			
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Nusa Tenggara Barat yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT)	Tingkat literasi digital	%	Menggambarkan tingkat pemahaman masyarakat tentang teknologi digital serta pemanfaatannya Formula: $= \frac{\text{Jumlah penduduk yn memahami teknologi digital}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100$ Sumber data: Dinas Kominfotik Prov. NTB
Tujuan			
TERWUJUDNYA PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH			
Sasaran			
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundang-	Kualifikasi Layanan Perangkat Daerah	kategori	Menggambarkan Kualitas layanan perangkat daerah yang berbasis IT Formula: Ditentukan melalui standar penilaian SPBE dari Kemenpan RB (Permenpan RP no. 59/2020) Penilaian Kualifikasi

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik			dilakukan oleh Tim Independent, dengan menggunakan metode penilaian yang dikeluarkan oleh KemenPan-RB. Sumber data: KemenPan RB
	Persentase Perangkat Daerah yang Informatif	%	Menggambarkan jumlah perangkat daerah yang memiliki kualifikasi informatif Formula: $= \frac{\text{Jumlah OPD berkualifikasi informatif}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100$ Sumber data: Dinas Kominfotik Prov. NTB
	Persentase penyediaan data statistik sektoral provinsi dan kabupaten/kota	%	Menggambarkan Penyediaan data statistik sektoral di provinsi dan kabupaten/kota Formula: $= \frac{\text{Jumlah data statistik sektoral yg tersedia}}{\text{Jumlah Jumlah data Statistik sektoral}} \times 100$ Sumber data: Dinas Kominfotik Prov. NTB
	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Data yang Berkualitas	%	Menggambarkan perangkat daerah dengan data statistik sektoral yang berkualitas Formula: $= \frac{\text{Jumlah OPD dengan data yang berkualitas}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100$ Sumber data: Dinas Kominfotik Prov. NTB
	Persentase aplikasi SPBE yang aman	%	Menggambarkan keamanan aplikasi SPBE di daerah Formula: $= \frac{\text{Jumlah aplikasi SPBE yang aman}}{\text{Jumlah Aplikasi SPBE}} \times 100$ Sumber data: Dinas Kominfotik Prov. NTB
	Indeks Kematangan Keamanan Informasi	level	Menggambarkan level keamanan informasi pemerintah Formula: Evaluasi dilakukan terhadap beberapa area target penerapan keamanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang juga memenuhi semua aspek keamanan yang didefinisikan oleh standar SNI ISO/IEC 27001:2009, yaitu: 1. Tata Kelola Keamanan Informasi 2. Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi 3. Kerangka Kerja Keamanan Informasi

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
			4. Pengelolaan Aset informasi 5. Teknologi dan Keamanan Informasi 6. Peran TIK Sumber data: KemenPan RB
Tujuan			
TERWUJUDNYA TRANSFORMASI EKONOMI MELALUI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAERAH MENUJU NTB SEBAGAI LOKOMOTIF PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL BALI DAN NUSA TENGGARA YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN			
Sasaran			
Meningkatnya lapangan kerja dan produktivitas daerah	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Informasi dan Komunikasi	%	Menggambarkan pertumbuhan produktivitas pada sektor Informasi dan Komunikasi pada PDRB NTB Formula: $= \frac{PDRB \text{ Sektor IK tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{PDRB \text{ Sektor IK tahun } t - 1} \times 100$ Ket.: PDRB sektor IK: PDRB sektor Informasi dan Komunikasi Sumber data: BPS Prov. NTB

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2024-2026

URUSAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN : Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

TUGAS POKOK : Merumuskan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Pembinaan Koperasi, Pembinaan Usaha Kecil Dan Menengah, Fasilitasi Pembiayaan Dan Simpan Pinjam, Pengawasan Koperasi serta Kesekretariatan.

FUNGSI :

- a. Perumusan kebijakan strategis dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
(1)	(2)		(3)
Tujuan			
TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS MANUSIA YANG KOMPETITIF, UNGGUL, ANDAL DAN TAQWA (KUAT)			
Sasaran			
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Nusa Tenggara Barat yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT)	Persentase jumlah start up (perusahaan rintisan) yang berkembang dari pelatihan kewirausahaan	%	Menggambarkan jumlah usaha/perusahaan yang timbul setelah adanya kegiatan pelatihan kewirausahaan Formula: $= \frac{\text{Jumlah perusahaan start up}}{\text{Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan}} \times 100$ Sumber data: Dinas Koperasi dan UKM
Tujuan			
TERWUJUDNYA KUALITAS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG MANDIRI			
Sasaran			
Meningkatnya pemerataan pendapatan serta kesejahteraan lahiriah (fisik) dan rohaniah (non fisik)	Pertumbuhan produktivitas Sub Sektor KUKM	%	Menggambarkan pertumbuhan produktivitas Sub Sektor KUKM pada PDRB NTB Formula: $= \frac{\text{PDRB Sub Sektor KUKM tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{\text{PDRB Sub Sektor KUKM tahun } t - 1} \times 100$ Sumber data: BPS Prov. NTB

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
Meningkatnya perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial dan inklusi keuangan	Koperasi Modern	%	Menggambarkan besaran koperasi dengan kualifikasi modern di suatu daerah Formula: $= \frac{\text{Jumlah koperasi modern}}{\text{Jumlah koperasi}} \times 100$ Sumber data: Dinas Koperasi dan UKM
Tujuan			
TERWUJUDNYA PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH			
Sasaran			
Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	Persentase peningkatan penerimaan PAD Dinas Koperasi dan UMKM (Retribusi)	%	Menggambarkan pertumbuhan pendapatan asli daerah yang bersumber dari Dinas Koperasi dan UKM Prov. NTB (Retribusi) Formula $= \frac{\text{PAD tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{\text{PAD tahun } t - 1} \times 100$ Sumber data: Dinas Koperasi dan UKM

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT
TAHUN 2024-2026

URUSAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN : Penanaman Modal

TUGAS POKOK : Merumuskan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kegiatan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Kesekretariatan.

FUNGSI :

- a. Perumusan kebijakan strategis dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
(1)	(2)		(3)
Tujuan			
TERWUJUDNYA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH			
Sasaran			
Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan strategis, kawasan transmigrasi dan perdesaan, mendorong investasi dan percepatan industrialisasi	Persentase Realisasi investasi pada kawasan strategis	%	Menggambarkan pertumbuhan realisasi investasi yang terjadi Formula: $= \frac{\text{Realisasi investasi tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{\text{Realisasi investasi tahun } t - 1} \times 100$ Sumber data: DPMPTSP Prov. NTB

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2024-2026

URUSAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN : Kepemudaan dan Olah Raga

TUGAS POKOK : Merumuskan bahan/ materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Pengembangan Daya Saing Kepemudaan, Pengembangan Daya Saing Olahraga, Pengembangan Sarana dan Prasarana serta Kesekretariatan.

FUNGSI :

- a. Perumusan kebijakan strategis dibidang Pemuda dan Olahraga;
- b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Pemuda dan Olahraga;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pemuda dan Olahraga;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Pemuda dan Olahraga; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
(1)	(2)		(3)
Tujuan			
TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS MANUSIA YANG KOMPETITIF, UNGGUL, ANDAL DAN TAQWA (KUAT)			
Sasaran			
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Nusa Tenggara Barat yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT)	Peningkatan prestasi olahraga tingkat nasional dan internasional	%	Menggambarkan prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional Formula: $= \frac{\text{Perolehan medali tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{\text{Perolehan medali tahun } t - 1} \times 100$ Sumber data: Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. NTB
	Prestasi Pemuda di tingkat nasional dan internasional	orang	Menggambarkan prestasi pemuda di ajang nasional dan internasional Formula: Menjumlah pemuda yang berprestasi di ajang nasional dan internasional Sumber data: Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. NTB
Tujuan			
TERWUJUDNYA PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH			
Sasaran			
Meningkatnya	Persentase	%	Menggambarkan

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
kemandirian fiskal daerah	peningkatan penerimaan PAD pada Dispora (Retribusi)		<p>pertumbuhan pendapatan asli daerah yang bersumber dari Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. NTB (Retribusi)</p> <p>Formula</p> $= \frac{PAD \text{ tahun } t - (tahun \ t - 1)}{PAD \text{ tahun } t - 1} \times 100$ <p>Sumber data: Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. NTB</p>

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2024-2026

URUSAN : 1. Perpustakaan
PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN : 2. Kearsipan

TUGAS POKOK : Merumuskan bahan/ materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan umum dibidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan, Deposit dan Informasi Perpustakaan, Pengelolaan Arsip Dinamis, Pengelolaan Arsip Statis, Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan serta Kesekretariatan.

FUNGSI : a. Perumusan kebijakan strategis dibidang Perpustakaan dan Kearsipan;
b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Perpustakaan dan Kearsipan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Perpustakaan dan Kearsipan;
d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Perpustakaan dan Kearsipan; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
(1)	(2)		(3)
Tujuan			
TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS MANUSIA YANG KOMPETITIF, UNGGUL, ANDAL DAN TAQWA (KUAT)			
Sasaran			
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Nusa Tenggara Barat yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT)	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	point	Menjelaskan tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari unsur-unsur pembangun literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat Formula: IPLM = (Jumlah seluruh variabel komponen pembentuk Indeks UPLM / jumlah populasi (AM) sesuai segmentasi lokus atau jenis perpustakaan) X 100. Sumber data: Perpustakaan Nasional
	Persentase	%	Menggambarkan jangkauan

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
	jangkauan layanan perpustakaan mobile ke desa		<p>perpustakaan mobile ke desa-desa</p> <p>Formula: $= \frac{\text{Jumlah desa yang dikunjungi perpustakaan mobile}}{\text{Jumlah Desa, Kelurahan}} \times 100$</p> <p>Sumber data: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. NTB</p>
	Persentase Arsip yang Terselamatkan	%	<p>Menggambarkan arsip-arsip penting milik daerah yang dapat diselamatkan</p> <p>Formula: $= \frac{\text{Jumlah arsip yang diselamatkan}}{\text{Jumlah arsip}} \times 100$</p> <p>Sumber data: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. NTB</p>

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2024-2026

URUSAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN : Kelautan dan Perikanan

TUGAS POKOK : Merumuskan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Penguatan Daya Saing Produk, Pengawasan Dan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil serta Kesekretariatan.

FUNGSI : a. Perumusan kebijakan strategis dibidang Kelautan dan Perikanan;
 b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Kelautan dan Perikanan;
 c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Kelautan dan Perikanan;
 d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Kelautan dan Perikanan; dan
 e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
(1)	(2)		(3)
Tujuan			
TERWUJUDNYA TRANSFORMASI EKONOMI MELALUI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAERAH MENUJU NTB SEBAGAI LOKOMOTIF PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL BALI DAN NUSA TENGGARA YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN			
Sasaran			
Meningkatnya lapangan kerja dan produktivitas daerah	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor Perikanan	%	Menggambarkan pertumbuhan produktivitas Sub Sektor Perikanan pada PDRB NTB Formula: $= \frac{PDRB \text{ Sub Sektor Perikanan tahun } t - (tahun \ t - 1)}{PDRB \text{ Sub Sektor Perikanan tahun } t - 1} \times 100$ Sumber data: BPS Prov. NTB
	Kontribusi PDRB Sektor Perikanan	%	Menggambarkan seberapa besar kontribusi subsektor perikanan dalam struktur PDRB Formula $= \frac{PDRB \text{ Sub Sektor Perikanan}}{PDRB} \times 100$ Sumber data: BPS Prov. NTB
Tujuan			
TERWUJUDNYA KUALITAS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG MANDIRI			
Sasaran			
Meningkatnya pemerataan pendapatan serta kesejahteraan	Produksi Perikanan	ton	Menggambarkan jumlah produksi perikanan dalam suatu wilayah setiap tahun Formula:

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
lahiriah (fisik) dan rohaniyah (non fisik)			Menjumlahkan seluruh produksi perikanan Sumber data: Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. NTB
	Nilai Tukar Nelayan	point	Menggambarkan kemampuan tukar ikan hasil tangkapan terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk kebutuhan produksi maupun kebutuhan konsumsi rumah tangga Formula: rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani Sumber data: BPS Prov. NTB
Tujuan			
TERWUJUDNYA PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH			
Sasaran			
Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dinas Kelautan dan Perikanan (Retribusi)	%	Menggambarkan pertumbuhan pendapatan asli daerah yang bersumber dari Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. NTB (Retribusi) Formula: $= \frac{PAD \text{ tahun } t - (tahun \ t - 1)}{PAD \text{ tahun } t - 1} \times 100$ Sumber data: Dinas Kelautan dan Perikanan

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PARIWISATA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2024-2026

URUSAN : Pariwisata
PEMERINTAH YANG
DILAKSANAKAN

TUGAS POKOK : Merumuskan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan Urusan pemerintahan dibidang Pariwisata kegiatan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kelembagaan Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif serta Kesekretariatan.

FUNGSI : a. Perumusan kebijakan strategis dibidang pariwisata;
b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang pariwisata;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pariwisata;
d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang pariwisata; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
(1)	(2)		(3)
Tujuan			
TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS MANUSIA YANG KOMPETITIF, UNGGUL, ANDAL DAN TAQWA (KUAT)			
Sasaran			
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Nusa Tenggara Barat yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT)	Persentase kota kreatif	%	Menggambarkan kota dimana orang-orang dapat berpikir, merencanakan, dan bertindak secara kreatif di dalam kota (Landry, 2006) Formula: Sumber data: N/A
	Persentase anggota pokdarwis yang memiliki sertifikasi kemampuan dan keterampilan berbahasa inggris (TOEFL/IELTS)	%	Menggambarkan anggota pokdarwis yang telah memiliki sertifikasi kemampuan dan keterampilan berbahasa inggris Formula: $= \frac{\text{Jumlah anggota pokdarwis bersertifikat bahasa inggris}}{\text{Jumlah pokdarwis}} \times 100$ Sumber data: Dinas Pariwisata Prov. NTB
Tujuan			
TERWUJUDNYA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH			
Sasaran			
Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan strategis,	Persentase pengembangan geosite geopark sebagai lokasi pengembangan	%	Menggambarkan pengembangan geosite geopark sebagai lokasi pengembangan green economy dan destinasi ecotourism Formula:

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
kawasan transmigrasi dan pedesaan, mendorong investasi dan percepatan industrialisasi	green economy dan destinasi eco tourism		$= \frac{\text{Jumlah geopark lokasi green economy dan ecotourism}}{\text{Jumlah geopark}} \times 100$ <p>Sumber data: Dinas Pariwisata Prov. NTB</p>
	Persentase peningkatan nilai investasi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	%	<p>Menggambarkan pertumbuhan realisasi investasi yang terjadi pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf)</p> <p>Formula:</p> $= \frac{\text{Realisasi investasi sektor parekraf tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{\text{Realisasi investasi sektor parekraf tahun } t - 1} \times 100$ <p>Sumber data: Dinas Pariwisata Prov. NTB</p>
Tujuan			
TERWUJUDNYA TRANSFORMASI EKONOMI MELALUI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAERAH MENUJU NTB SEBAGAI LOKOMOTIF PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL BALI DAN NUSA TENGGARA YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN			
Sasaran			
Meningkatnya lapangan kerja dan produktivitas daerah	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	<p>Menggambarkan pertumbuhan produktivitas sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada PDRB NTB</p> <p>Formula:</p> $= \frac{\text{PDRB Sektor AMM tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{\text{PDRB Sektor AMM tahun } t - 1} \times 100$ <p>Ket.: PDRB Sektor AMM: PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</p> <p>Sumber data: BPS Prov. NTB</p>
	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor Penyediaan Akomodasi	%	<p>Menggambarkan pertumbuhan produktivitas sub sektor Penyediaan Akomodasi pada PDRB NTB</p> <p>Formula:</p> $= \frac{\text{PDRB sub sektor PA tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{\text{PDRB sub sektor PA tahun } t - 1} \times 100$ <p>Ket.: PDRB sub Sektor PA: PDRB sub sektor Penyediaan Akomodasi</p> <p>Sumber data: BPS Prov. NTB</p>
	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor Penyediaan Makan Minum	%	<p>Menggambarkan pertumbuhan produktivitas sektor Penyediaan Makan Minum pada PDRB NTB</p> <p>Formula:</p> $= \frac{\text{PDRB sub sektor PMM tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{\text{PDRB sub sektor PMM tahun } t - 1} \times 100$ <p>Ket.: PDRB sub sektor PMM: PDRB sub sektor Penyediaan Makan Minum</p> <p>Sumber data: BPS Prov. NTB</p>
Tujuan			
TERWUJUDNYA KUALITAS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG MANDIRI			
Sasaran			
Meningkatnya pemerataan pendapatan serta	Persentase Desa Wisata yang berprestasi nasional dan internasional	%	<p>Menggambarkan besaran desa wisata dengan prestasi di tingkat nasional dan internasional</p> <p>Formula:</p>

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
kesejahteraan lahiriah (fisik) dan rohaniah (non fisik)			$= \frac{\text{Jumlah desa wisata berprestasi}}{\text{Jumlah desa wisata}} \times 100$ <p>Sumber data: Dinas Pariwisata Prov. NTB</p>
	Rata-rata Lama Menginap	hari	<p>Menggambarkan berapa lama seorang wisatawan berada disuatu wilayah</p> <p>Formula:</p> $\text{Rata-rata Lama Menginap} = \frac{a}{b}$ <p>Dimana: a = Banyaknya malam tempat tidur yang dipakai b = Banyaknya tamu</p> <p>Sumber data: BPS Prov. NTB</p>
	Angka kunjungan wisatawan	orang	<p>Menggambarkan jumlah wisatawan yang berkunjung dalam suatu periode tertentu</p> <p>Formula:</p> <p>Menjumlahkan seluruh wisatawan yang berkunjung (nusantara dan mancanegara)</p> <p>Sumber data: BPS Prov. NTB</p>
	Angka Kunjungan Wisata Nusantara	%	<p>Menggambarkan besaran wisatawan nusantara yang berkunjung dalam suatu periode tertentu</p> <p>Formula:</p> $= \frac{\text{Jumlah wisatawan nusantara}}{\text{Jumlah wisatawan}} \times 100$ <p>Sumber data: BPS Prov. NTB</p>
	Angka Kunjungan Wisata Mancanegara	%	<p>Menggambarkan besaran wisatawan mancanegara yang berkunjung dalam suatu periode tertentu</p> <p>Formula:</p> $= \frac{\text{Jumlah wisatawan mancanegara}}{\text{Jumlah wisatawan}} \times 100$ <p>Sumber data: BPS Prov. NTB</p>
Tujuan			
TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN YANG LESTARI DAN ASRI			
Sasaran			
Meningkatnya ketahanan iklim dan ketangguhan menghadapi resiko bencana	Pemilahan sampah perhotelan/destinasi pariwisata	%	<p>Menggambarkan jumlah Hotel Berbintang yang telah melakukan pemilahan sampah</p> <p>Formula:</p> $= \frac{\text{Jumlah hotel yg telah memilah sampah}}{\text{Jumlah Hotel}} \times 100$ <p>Sumber data: Dinas Pariwisata Prov. NTB</p>
	Pemilahan sampah rumah makan dan restoran	%	<p>Menggambarkan jumlah Rumah makan dan restoran yang telah melakukan pemilahan sampah</p> <p>Formula:</p> $= \frac{\text{Jumlah RM dan restoran yg telah memilah sampah}}{\text{Jumlah RM dan restoran}} \times 100$ <p>Sumber data: Dinas Pariwisata Prov. NTB</p>
Tujuan			
TERWUJUDNYA PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH			
Sasaran			

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dinas Pariwisata (Retribusi)	%	<p>Menggambarkan pertumbuhan pendapatan asli daerah yang bersumber dari Dinas Pariwisata Prov. NTB (Retribusi)</p> <p>Formula:</p> $= \frac{PAD \text{ tahun } t - (tahun \ t - 1)}{PAD \text{ tahun } t - 1} \times 100$ <p>Sumber data: Dinas Pariwisata Prov. NTB</p>

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2024-2026

URUSAN : Pertanian
 PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN

TUGAS POKOK : Merumuskan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian kegiatan Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Sarana dan Prasarana Pertanian, serta Kesekretariatan.

FUNGSI : a. Perumusan dan penyelenggaraan bahan/materi kebijakan di bidang Pertanian dan Perkebunan;
 b. Perumusan dan penyelenggaraan Rencana/Program kebijakan di bidang Pertanian dan Perkebunan;
 c. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi;
 d. Pelaksanaan administrasi dinas, pembinaan, di bidang Pertanian dan Perkebunan; dan
 e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
(1)	(2)		(3)
Tujuan			
TERWUJUDNYA TRANSFORMASI EKONOMI MELALUI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAERAH MENUJU NTB SEBAGAI LOKOMOTIF PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL BALI DAN NUSA TENGGARA YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN			
Sasaran			
Meningkatnya lapangan kerja dan produktivitas daerah	Persentase peningkatan upah kerja pada lapangan usaha pertanian	%	Menggambarkan pertumbuhan upah tenaga kerja pada lapangan usaha pertanian Formula: $= \frac{\text{Upah TK tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{\text{Upah TK tahun } t - 1} \times 100$ Sumber data: Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov. NTB
	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	Menggambarkan pertumbuhan produktivitas sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada PDRB NTB Formula: $= \frac{\text{PDRB Sektor PKP tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{\text{PDRB Sektor PKP tahun } t - 1} \times 100$ Ket.: PDRB Sektor PKP: PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
			Perikanan Sumber data: BPS Prov. NTB
	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	%	Menggambarkan pertumbuhan produktivitas sub sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian pada PDRB NTB Formula: $= \frac{PDRB \text{ sub sektor PPJP tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{PDRB \text{ sub sektor PPJP tahun } t - 1} \times 100$ Ket.: PDRB Sektor PKP: PDRB sub sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian Sumber data: BPS Prov. NTB
	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor Tanaman Pangan	%	Menggambarkan pertumbuhan produktivitas sub sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian pada PDRB NTB Formula: $= \frac{PDRB \text{ sub sektor PPJP tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{PDRB \text{ sub sektor PPJP tahun } t - 1} \times 100$ Ket.: PDRB Sektor PPJP: PDRB sub sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian Sumber data: BPS Prov. NTB
	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor Tanaman Hortikultura	%	Menggambarkan pertumbuhan produktivitas sub sektor Tanaman Hortikultura pada PDRB NTB Formula: $= \frac{PDRB \text{ sub sektor TH tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{PDRB \text{ sub sektor TH tahun } t - 1} \times 100$ Ket.: PDRB Sektor PKP: PDRB sub sektor Tanaman Hortikultura Sumber data: BPS Prov. NTB
	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor Perkebunan	%	Menggambarkan pertumbuhan produktivitas sub sektor Tanaman Hortikultura pada PDRB NTB Formula: $= \frac{PDRB \text{ sub sektor perkebunan tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{PDRB \text{ sub sektor perkebunan tahun } t - 1} \times 100$ Sumber data: BPS Prov. NTB
	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor Jasa Pertanian dan Perburuan	%	Menggambarkan pertumbuhan produktivitas sub sektor Jasa Pertanian dan Perburuan pada PDRB NTB Formula: $= \frac{PDRB \text{ sub sektor JPP tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{PDRB \text{ sub sektor JPP tahun } t - 1} \times 100$ Ket.: PDRB Sektor JPP: PDRB sub sektor Jasa Pertanian dan

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
			Perburuan Sumber data: BPS Prov. NTB
	Kontribusi PDRB Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	%	Menggambarkan seberapa besar kontribusi Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam struktur PDRB Formula $= \frac{PDRB \text{ Sektor Pertanian}}{PDRB} \times 100$ Sumber data: BPS Prov. NTB
Tujuan			
TERWUJUDNYA KUALITAS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG MANDIRI			
Sasaran			
Meningkatnya pemerataan pendapatan serta kesejahteraan lahiriah (fisik) dan rohaniyah (non fisik)	Nilai Tukar Petani	point	Menggambarkan tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi Formula: $= \frac{\text{Indeks harga yg diterima petani (It)}}{\text{Indeks harga yg dibayar petani (Ib)}}$ Sumber data: BPS Prov. NTB
Tujuan			
TERWUJUDNYA PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH			
Sasaran			
Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dinas Pertanian dan Perkebunan (Retribusi)	%	Menggambarkan pertumbuhan pendapatan asli daerah yang bersumber dari Dinas Pariwisata Prov. NTB (Retribusi) Formula: $= \frac{PAD \text{ tahun } t - (tahun t - 1)}{PAD \text{ tahun } t - 1} \times 100$ Sumber data: Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov. NTB

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2024-2026

URUSAN : Pertanian
 PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN

TUGAS POKOK : Merumuskan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan umum dibidang Kesehatan Hewan, Budidaya, Sarana dan Prasarana Peternakan, Penyuluhan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Kesehatan Masyarakat Veteriner serta Kesekretariatan.

FUNGSI : a. Perumusan kebijakan strategis dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
 e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
(1)	(2)		(3)
Tujuan			
TERWUJUDNYA TRANSFORMASI EKONOMI MELALUI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAERAH MENUJU NTB SEBAGAI LOKOMOTIF PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL BALI DAN NUSA TENGGARA YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN			
Sasaran			
Meningkatnya lapangan kerja dan produktivitas daerah	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor Peternakan	%	Menggambarkan pertumbuhan produktivitas Sub Sektor Peternakan pada PDRB NTB Formula: $= \frac{PDRB \text{ Sub Sektor Peternakan tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{PDRB \text{ Sub Sektor Peternakan tahun } t - 1} \times 100$ Sumber data: BPS Prov. NTB
	Kontribusi PDRB Sektor Peternakan	%	Menggambarkan seberapa besar kontribusi Sub Sektor Peternakan dalam struktur PDRB Formula $= \frac{PDRB \text{ Sub Sektor Peternakan}}{PDRB} \times 100$ Sumber data: BPS Prov. NTB
Tujuan			
TERWUJUDNYA PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH			
Sasaran			
Meningkatnya kemandirian fiskal	Persentase peningkatan	%	Menggambarkan pertumbuhan pendapatan asli daerah yang

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
daerah	penerimaan PAD pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Retribusi dan LLPAD)		bersumber dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Retribusi dan LLPAD) Formula: $= \frac{PAD \text{ tahun } t - (tahun \ t - 1)}{PAD \text{ tahun } t - 1} \times 100$ Sumber data: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. NTB

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2024-2026

URUSAN : Energi dan Sumberdaya Mineral
 PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN

TUGAS POKOK : Merumuskan bahan/materi penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan monitoring, perumusan dan penyusunan rencana/program, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan umum dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang merupakan urusan pemerintahan provinsi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan

FUNGSI : a. Perumusan kebijakan strategis dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
 b. Penyelenggaraan kebijakan strategis dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
 c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
 d. Penyelenggaraan administrasi dinas dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
 e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
(1)	(2)		(3)
Tujuan			
TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN YANG LESTARI DAN ASRI			
Sasaran			
Meningkatnya ketahanan iklim dan ketangguhan menghadapi resiko bencana	Bauran energi baru terbarukan	%	Menggambarkan besaran penggunaan energi terbarukan dibandingkan dengan penggunaan energi listrik secara keseluruhan Formula: $= \frac{\text{Penggunaan energi terbarukan}}{\text{Penggunaan listrik secara keseluruhan}} \times 100$ Sumber data: Dinas ESDM Prov. NTB
Tujuan			
TERWUJUDNYA TRANSFORMASI EKONOMI MELALUI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAERAH MENUJU NTB SEBAGAI LOKOMOTIF PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL BALI DAN NUSA TENGGARA YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN			
Sasaran			
Meningkatnya lapangan kerja dan produktivitas daerah	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Pertambangan dan Penggalian	%	Menggambarkan pertumbuhan produktivitas sektor Pertambangan dan Penggalian pada PDRB NTB Formula:

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
			$= \frac{PDRB \text{ Sektor Pertambangan tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{PDRB \text{ Sektor Pertambangan tahun } t - 1} \times 100$ <p>Sumber data: BPS Prov. NTB</p>
	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor Pertambangan dan Penggalian Lainnya	%	<p>Menggambarkan pertumbuhan produktivitas sub sektor Pertambangan dan Penggalian Lainnya pada PDRB NTB</p> <p>Formula:</p> $= \frac{PDRB \text{ sub sektor PPL tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{PDRB \text{ Sub sektor PPL tahun } t - 1} \times 100$ <p>Ket.:</p> <p>PDRB sub sektor PPL: PDRB sub sektor Pertambangan dan Penggalian Lainnya</p> <p>Sumber data: BPS Prov. NTB</p>
	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Pengadaan Listrik dan Gas	%	<p>Menggambarkan pertumbuhan produktivitas sektor Pengadaan Listrik dan Gas pada PDRB NTB</p> <p>Formula:</p> $= \frac{PDRB \text{ Sektor PLG tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{PDRB \text{ Sektor PLG tahun } t - 1} \times 100$ <p>Ket.:</p> <p>PDRB sektor PLG: PDRB sektor Pengadaan Listrik dan Gas</p> <p>Sumber data: BPS Prov. NTB</p>
	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor Ketenagalistrikan	%	<p>Menggambarkan pertumbuhan produktivitas sub sektor Ketenagalistrikan pada PDRB NTB</p> <p>Formula:</p> $= \frac{PDRB \text{ sub sektor listrik tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{PDRB \text{ Sub sektor PPL tahun } t - 1} \times 100$ <p>Ket.:</p> <p>PDRB sub sektor listrik: PDRB sub sektor Ketenagalistrikan</p> <p>Sumber data: BPS Prov. NTB</p>

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERDAGANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2024-2026

URUSAN : Perdagangan
PEMERINTAH YANG
DILAKSANAKAN

TUGAS POKOK : Merumuskan bahan/materi kebijakan, rencana/ program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pengkajian, analisis pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Perdagangan kegiatan Perlindungan Konsumen, Pengawasan dan Tertib Niaga, Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Pengembangan Perdagangan Luar Negeri serta Kesekretariatan.

FUNGSI : a. Perumusan kebijakan strategis dibidang Perdagangan;
b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Perdagangan;
c. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Perdagangan;
d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Perdagangan;
dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
(1)	(2)		(3)
Tujuan			
TERWUJUDNYA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH			
Sasaran			
Meningkatnya kapabilitas inovasi mendukung peningkatan kinerja industri dan pengembangan ekspor	Persentase peningkatan ekspor	%	Menggambarkan pertumbuhan perdagangan ekspor secara keseluruhan Formula: $= \frac{\text{Ekspor tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{\text{Ekspor tahun } t - 1} \times 100$ Sumber data: Dinas Perdagangan Prov. NTB
Tujuan			
TERWUJUDNYA TRANSFORMASI EKONOMI MELALUI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAERAH MENUJU NTB SEBAGAI LOKOMOTIF PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL BALI DAN NUSA TENGGARA YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN			
Sasaran			
Meningkatnya lapangan kerja dan produktivitas daerah	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil	%	Menggambarkan pertumbuhan produktivitas sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada PDRB NTB Formula: $= \frac{\text{PDRB Sektor Perdagangan tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{\text{PDRB Sektor Perdagangan tahun } t - 1} \times 100$ Ket.:

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
	dan Sepeda Motor		PDRB sektor PLG: PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Sumber data: BPS Prov. NTB
	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	%	Menggambarkan pertumbuhan produktivitas sub sektor Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya pada PDRB NTB Formula: $= \frac{PDRB \text{ Sub sektor PMSM tahun } t - (tahun \ t - 1)}{PDRB \text{ Sub sektor PMSM tahun } t - 1} \times 100$ Ket.: PDRB sub sektor PMSM: PDRB sub sektor Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya Sumber data: BPS Prov. NTB
	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	%	Menggambarkan pertumbuhan produktivitas sub sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor pada PDRB NTB Formula: $= \frac{PDRB \text{ Sub sektor PBE tahun } t - (tahun \ t - 1)}{PDRB \text{ Sub sektor PBE tahun } t - 1} \times 100$ Ket.: PDRB sub sektor PBE: PDRB sub sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor Sumber data: BPS Prov. NTB
Tujuan			
TERWUJUDNYA KUALITAS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG MANDIRI			
Sasaran			
Meningkatnya pemerataan pendapatan serta kesejahteraan lahiriah (fisik) dan rohaniah (non fisik)	Pengeluaran Per Kapita	Rp. Ribu	Menggambarkan Komposisi pengeluaran rumah tangga yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan Formula: $= \frac{Pengeluaran \text{ seluruh anggota rumah tangga dalam 1 bulan}}{Jumlah \text{ anggota rumah tangga}} \times 100$ Sumber data: BPS Prov. NTB
Tujuan			
TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN YANG LESTARI DAN ASRI			
Sasaran			
Meningkatnya ketahanan iklim dan ketangguhan menghadapi resiko bencana	Pemilahan sampah pasar	%	Menggambarkan jumlah pasar yang telah melakukan pemilahan sampah Formula: $= \frac{Jumlah \text{ pasar yg telah memilah sampah}}{Jumlah \text{ pasar}} \times 100$ Sumber data: Dinas Pariwisata Prov. NTB

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2024-2026

URUSAN : Perindustrian
PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN

TUGAS POKOK : Merumuskan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian kegiatan Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri, Pembangunan Sumber Daya Industri, Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri, Balai Industri Kemasan Produk Daerah (BIKPD) serta Kesekretariatan.

FUNGSI : a. Perumusan dan penyelenggaraan bahan/materi kebijakan strategis di bidang Perindustrian;
b. Perumusan dan penyelenggaraan Rencana/Program kebijakan strategis di bidang Perindustrian;
c. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi;
d. Pelaksanaan administrasi dinas, pembinaan, di bidang Perindustrian; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
(1)	(2)		(3)
Tujuan			
TERWUJUDNYA KUALITAS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG MANDIRI			
Sasaran			
Meningkatnya pemerataan pendapatan serta kesejahteraan lahiriah (fisik) dan rohaniah (non fisik)	Persentase peningkatan upah kerja pada lapangan usaha industri	%	Menggambarkan pertumbuhan upah tenaga kerja pada lapangan usaha industri Formula: $= \frac{\text{Upah TK tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{\text{Upah TK tahun } t - 1} \times 100$ Sumber data: Dinas Perindustrian Prov. NTB
Tujuan			
TERWUJUDNYA TRANSFORMASI EKONOMI MELALUI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAERAH MENUJU NTB SEBAGAI LOKOMOTIF PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL BALI DAN NUSA TENGGARA YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN			
Sasaran			
Meningkatnya lapangan kerja dan produktivitas daerah	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Industri Pengolahan	%	Menggambarkan pertumbuhan produktivitas sektor Industri Pengolahan pada PDRB NTB Formula: $= \frac{\text{PDRB Sektor industri tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{\text{PDRB Sektor industri tahun } t - 1} \times 100$

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
			Sumber data: BPS Prov. NTB
	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor Industri Makanan dan Minuman	%	Menggambarkan pertumbuhan produktivitas ekonomi sub sektor Industri Makanan dan Minuman pada PDRB NTB Formula: $= \frac{PDRB \text{ sub sektor IMM tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{PDRB \text{ sub sektor IMM tahun } t - 1} \times 100$ Ket.: PDRB sub sektor IMM: PDRB ekonomi sub sektor Industri Makanan dan Minuman Sumber data: BPS Prov. NTB
	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor Pengolahan Tembakau	%	Menggambarkan pertumbuhan produktivitas ekonomi sub sektor Pengolahan Tembakau pada PDRB NTB Formula: $= \frac{PDRB \text{ sub sektor PT tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{PDRB \text{ sub sektor PT tahun } t - 1} \times 100$ Ket.: PDRB sub sektor PT: PDRB ekonomi sub sektor Pengolahan Tembakau Sumber data: BPS Prov. NTB
	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	%	Menggambarkan pertumbuhan produktivitas ekonomi sub sektor Industri Tekstil dan Pakaian Jadi pada PDRB NTB Formula: $= \frac{PDRB \text{ sub sektor ITP tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{PDRB \text{ sub sektor ITP tahun } t - 1} \times 100$ Ket.: PDRB sub sektor ITP: PDRB ekonomi sub sektor Industri Tekstil dan Pakaian Jadi Sumber data: BPS Prov. NTB
	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	%	Menggambarkan pertumbuhan produktivitas ekonomi sub sektor Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya pada PDRB NTB Formula: $= \frac{PDRB \text{ sub sektor KBKG tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{PDRB \text{ sub sektor KBKG tahun } t - 1} \times 100$ Ket.: PDRB sub sektor KBKG: PDRB ekonomi sub sektor Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya Sumber data: BPS Prov. NTB
	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor Industri	%	Menggambarkan pertumbuhan produktivitas ekonomi sub sektor Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
	Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman		dan Reproduksi Media Rekaman pada PDRB NTB Formula: $= \frac{PDRB \text{ sub sektor KBKP tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{PDRB \text{ sub sektor KBKP tahun } t - 1} \times 100$ Ket.: PDRB sub sektor KBKP: PDRB ekonomi sub sektor Industri Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman Sumber data: BPS Prov. NTB
	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	%	Menggambarkan pertumbuhan produktivitas ekonomi sub sektor Industri Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional pada PDRB NTB Formula: $= \frac{PDRB \text{ sub sektor IKF tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{PDRB \text{ sub sektor IKF tahun } t - 1} \times 100$ Ket.: PDRB sub sektor IKF: PDRB ekonomi sub sektor Industri Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional Sumber data: BPS Prov. NTB
	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	%	Menggambarkan pertumbuhan produktivitas ekonomi sub sektor Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik pada PDRB NTB Formula: $= \frac{PDRB \text{ sub sektor IKB tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{PDRB \text{ sub sektor IKB tahun } t - 1} \times 100$ Ket.: PDRB sub sektor IKB: PDRB ekonomi sub sektor Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik Sumber data: BPS Prov. NTB
	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor Industri Barang Galian bukan Logam	%	Menggambarkan pertumbuhan produktivitas ekonomi sub sektor Industri Barang Galian bukan Logam pada PDRB NTB Formula: $= \frac{PDRB \text{ sub sektor IBG tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{PDRB \text{ sub sektor IBG tahun } t - 1} \times 100$ Ket.: PDRB sub sektor IBG: PDRB ekonomi sub sektor Industri Barang Galian bukan Logam Sumber data: BPS Prov. NTB
	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor Industri Logam Dasar	%	Menggambarkan pertumbuhan produktivitas ekonomi sub sektor Industri Logam Dasar pada PDRB NTB Formula:

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
			$= \frac{PDRB \text{ sub sektor LD tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{PDRB \text{ sub sektor LD tahun } t - 1} \times 100$ Ket.: PDRB sub sektor LD: PDRB ekonomi sub sektor Industri Logam Dasar Sumber data: BPS Prov. NTB
	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	%	Menggambarkan pertumbuhan produktivitas ekonomi sub sektor Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik pada PDRB NTB Formula: $= \frac{PDRB \text{ sub sektor LKBE tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{PDRB \text{ sub sektor LKBE tahun } t - 1} \times 100$ Ket.: PDRB sub sektor LKBE: PDRB ekonomi sub sektor Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik Sumber data: BPS Prov. NTB
	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor Industri Alat Angkutan	%	Menggambarkan pertumbuhan produktivitas ekonomi sub sektor Industri Industri Alat Angkutan pada PDRB NTB Formula: $= \frac{PDRB \text{ sub sektor AA tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{PDRB \text{ sub sektor AA tahun } t - 1} \times 100$ Ket.: PDRB sub sektor AA: PDRB ekonomi sub sektor Industri Industri Alat Angkutan Sumber data: BPS Prov. NTB
	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor Industri Furnitur	%	Menggambarkan pertumbuhan produktivitas ekonomi sub sektor Industri Furnitur pada PDRB NTB Formula: $= \frac{PDRB \text{ sub sektor furnitur tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{PDRB \text{ sub sektor furnitur tahun } t - 1} \times 100$ Sumber data: BPS Prov. NTB
	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	%	Menggambarkan pertumbuhan produktivitas ekonomi sub sektor Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan pada PDRB NTB Formula: $= \frac{PDRB \text{ sub sektor PJR tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{PDRB \text{ sub sektor PJR tahun } t - 1} \times 100$ Ket.: PDRB sub sektor PJR: PDRB ekonomi sub sektor Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
			Sumber data: BPS Prov. NTB
Tujuan			
TERWUJUDNYA PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH			
Sasaran			
Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dinas Perindustrian (Retribusi)	%	Menggambarkan pertumbuhan pendapatan asli daerah yang bersumber dari Dinas Perindustrian (Retribusi) Formula: $= \frac{PAD \text{ tahun } t - (tahun \ t - 1)}{PAD \text{ tahun } t - 1} \times 100$ Sumber data: Dinas Perindustrian Prov. NTB

INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2024-2026

URUSAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN : Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

TUGAS POKOK : Merumuskan bahan/ materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, pengkajian, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat meliputi Penegakan Perundang-undangan daerah, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Sumber Daya Aparatur, Perlindungan Masyarakat serta Kesekretariatan.

FUNGSI :

- a. Perumusan kebijakan strategis dibidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
(1)	(2)		(3)
Tujuan			
TERWUJUDNYA KUALITAS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG MANDIRI			
Sasaran			
Meningkatnya perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial dan inklusi keuangan	Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	%	Menggambarkan Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang terjadi Formula: $= \frac{\text{Jumlah gangguan trantibum yg ditangani}}{\text{Jumlah gangguan trantibum}} \times 100$ Sumber data: SatPOLPP Prov. NTB
	Persentase pemenuhan SPM ketenteraman dan ketertiban umum Provinsi	%	Menggambarkan capaian pemenuhan SPM ketenteraman dan ketertiban umum Provinsi pada SatpolPP Prov. NTB Formula: $= \frac{\text{Jumlah indikator SPM trantibum yang tercapai}}{\text{Jumlah indikator SPM trantibum}} \times 100$ Sumber data: SatPOLPP Prov. NTB
Tujuan			
TERWUJUDNYA PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH			
Sasaran			
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan	Persentase penyelesaian pelanggaran	%	Menggambarkan jumlah pelanggaran produk hukum daerah yang diselesaikan

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
pemerintahan daerah dalam pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik	produk hukum daerah		<p>Formula:</p> $= \frac{\text{Jumlah Pelanggaran Produk hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran produk hukum}} \times 100$ <p>Sumber data: SatPOLPP Prov. NTB</p>

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2024-2026

URUSAN : Perencanaan
PEMERINTAH YANG
DILAKSANAKAN

TUGAS POKOK : Merumuskan bahan/materi penyusunan Kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/program, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Perencanaan Daerah, kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan , serta Kesekretariatan.

FUNGSI : a. Perumusan bahan/materi dan Penyusunan kebijakan strategis dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Perumusan Perencanaan program dan kegiatan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
c. Penyelenggaraan pengoordinasian, Pemantauan, Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
d. Pembinaan teknis
e. penyelenggaraan fungsi Perencanaan Pembangunan Daerah; dan Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
(1)	(2)		(3)
Tujuan			
TERWUJUDNYA PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH			
Sasaran			
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik	Indeks perencanaan pembangunan daerah	kategori	Menggambarkan tingkat keselarasan dari perencanaan di tingkat nasional dan daerah dan memastikan terjadinya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi untuk kelancaran proses pembangunan nasional Formula: Kementerian PPN/Bappenas RI menghitung indeks ini dengan memperhatikan tiga aspek yakni: Sinergi rencana nasional, kualitas perencanaan, dan Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
			Sumber data: Kementerian PPN/Bappenas RI
	Perkembangan jumlah mitra pembangunan	angka	Menggambarkan Perkembangan jumlah mitra pembangunan yg bersinergi dengan Pemerintah daerah Formula: Menjumlahkan mitra pembangunan yang berkontribusi dalam pembangunan daerah Sumber data: Bappeda Prov. NTB

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT
TAHUN 2024-2026

URUSAN : Keuangan
 PEMERINTAH YANG
 DILAKSANAKAN

TUGAS POKOK : Merumuskan bahan/materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/ program, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dibidang Keuangan, meliputi Anggaran, Perbendaharaan, Bina dan Evaluasi Keuangan Kabupaten/Kota, Akuntansi dan Pelaporan, Pengelolaan Barang Milik Daerah serta Kesekretariatan.

FUNGSI : a. Perumusan bahan/materi dan Penyusunan kebijakan strategis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 b. Perumusan bahan kebijakan dan Pelaksanaan tugas dukungan teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
(1)	(2)		(3)
Tujuan			
TERWUJUDNYA PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH			
Sasaran			
Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	Kepatuhan distribusi alokasi fungsi pendidikan	%	Menggambarkan kepatuhan terhadap Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 Amandemen ke 4 yang mengamanatkan alokasi anggaran Pendidikan sebesar 20% dari APBD Formula: $= APBD \times 20\%$ Sumber data: BPKAD Prov. NTB
	Kepatuhan distribusi alokasi fungsi kesehatan	%	Menggambarkan kepatuhan terhadap UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan tercantum pada Bab XV Pembiayaan Kesehatan pada pasal 171 yang mengamanatkan besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
			dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji Formula: $= (APBD - Gaji) \times 10\%$ Sumber data: BPKAD Prov. NTB
	Kepatuhan distribusi alokasi infrastruktur	%	Menggambarkan kepatuhan Terhadap alokasi anggaran untuk bidang infrastruktur sebesar 25 persen dari Dana Transfer Umum Formula: $= Dana Transfer Umum \times 25\%$ Sumber data: BPKAD Prov. NTB Catatan: 25 persen disesuaikan dengan aturan berlaku pada tahun berjalan
	Kepatuhan distribusi alokasi pengawasan	%	Menggambarkan kepatuhan terhadap alokasi anggaran di bidang pengawasan sebesar 0,6 persen dari APBD Formula: $= APBD \times 0,6\%$ Sumber data: BPKAD Prov. NTB Catatan: 25 persen disesuaikan dengan aturan berlaku pada tahun berjalan
	Kepatuhan distribusi alokasi kebencanaan	%	Menggambarkan kepatuhan terhadap alokasi anggaran untuk kebencanaan sebesar 0,6 persen dari APBD Formula: $= APBD \times 1\%$ Sumber data: BPKAD Prov. NTB Catatan: 1 persen disesuaikan dengan aturan berlaku pada tahun berjalan
	Persentase peningkatan retribusi dan LLPAD pada BPKAD	%	Menggambarkan pertumbuhan pendapatan asli daerah yang bersumber dari BPKAD (Retribusi dan LPPD) Formula: $= \frac{PAD \text{ tahun } t - (tahun \ t - 1)}{PAD \text{ tahun } t - 1} \times 100$ Sumber data: BPKAD Prov. NTB

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2024-2026

URUSAN : Kepegawaian
 PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN

TUGAS POKOK : Merumuskan bahan/materi penyusunan kebijakan strategis, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/program, pelaksanaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dibidang manajemen kepegawaian daerah meliputi Kesekretariatan, Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, Mutasi dan Promosi, Pengembangan Aparatur, Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan serta Unit Pelayanan Penilaian Kompetensi.

FUNGSI : a. Perumusan bahan/materi dan Penyusunan kebijakan strategis dibidang Manajemen Kepegawaian Daerah;
 b. Perumusan Perencanaan program dan kegiatan di bidang Manajemen Kepegawaian Daerah;
 c. Penyelenggaraan pengoordinasian, Pemantauan, Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Manajemen Kepegawaian Daerah;
 d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi Manajemen Kepegawaian Daerah; dan
 e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
(1)	(2)		(3)
Tujuan			
TERWUJUDNYA PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH			
Sasaran			
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur,	Indeks Profesionalisme ASN	point	Menggambarkan tingkat Profesionalitas ASN berdasarkan standar Profesionalitas tertentu sebagai area pengembangan diri ASN dan instrumen kontrol sosial Pegawai ASN selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan public Formula:

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik			$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block; margin-right: 20px;"> $IP_1 = W_{11} \times R_{11}$ </div> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> $IP_2 = W_{21} \times R_{21}$ $IP_3 = W_{31} \times R_{31}$ $IP_4 = W_{41} \times R_{41}$ </div> <p>Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP₁ = Indeks Profesionalisme ke-1 IP₂ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP₃ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP₄ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP₅ = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin Sumber data: BKD Prov. NTB</p>
	Dimensi Kualifikasi	%	Menggambarkan kualifikasi pendidikan formal PNS paling tinggi sampai yang paling rendah. Dimensi Kualifikasi diperhitungkan sebesar 25% dari seluruh pengukuran Formula: $= W_{1j} \times R_{1j}$ Ket.: $W_{1j} \times R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j di kali Rating jawaban indikator kualifikasi ke-j Sumber data: BKD Prov. NTB
	Dimensi Kinerja	%	Menggambarkan penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit organisasi dengan memperhatikan target capaian, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku PNS. Dimensi ini diperhitungkan sebesar 30% dari seluruh pengukuran Formula: $= W_{2k} \times R_{2k}$ Ket.: $W_{2k} \times R_{2k}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-k di kali Rating jawaban indikator kualifikasi ke-k Sumber data: BKD Prov. NTB
	Dimensi Disiplin	%	Menggambarkan informasi yang memuat hukuman yang telah diterima PNS, dimensi disiplin diperhitungkan sebesar 5% dari seluruh pengukuran Formula: $= W_{31} \times R_{31}$ Ket.: $W_{31} \times R_{31}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-1 di kali Rating jawaban indikator kualifikasi ke-1 Sumber data: BKD Prov. NTB

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA
 BARAT
 TAHUN 2024-2026

URUSAN : Pendidikan dan Pelatihan
 PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN

TUGAS POKOK : Merumuskan bahan/materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/program, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dibidang Pendidikan dan Pelatihan (Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah), meliputi Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Teknis, Evaluasi Pelaporan dan Kerja Sama. Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, serta Kesekretariatan.

FUNGSI : a. Perumusan bahan/materi dan Penyusunan kebijakan strategis Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
 b. Perumusan bahan kebijakan dan Pelaksanaan tugas dukungan teknis Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
 c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
 d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah; dan
 e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
(1)	(2)		(3)
Tujuan			
TERWUJUDNYA PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH			
Sasaran			
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik	Dimensi kompetensi	%	Menggambarkan data atau informasi riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS yang memiliki kesesuaian dengan pelaksanaan tugas dan jabatan dimensi. Kompetensi diperhitungkan sebesar 40% dari seluruh pengukuran Formula: $= W_{4m} \times R_{4m}$ Ket.: $W_{4m} \times R_{4m} =$ Bobot Indikator Kualifikasi ke-m di kali Rating jawaban indikator kualifikasi ke-m

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
			Sumber data: BPSDM Prov. NTB
Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada BPSDM (Retribusi dan LLPAD)	%	Menggambarkan pertumbuhan pendapatan asli daerah yang bersumber dari BPSDM (Retribusi dan LPPD) Formula: $= \frac{PAD \text{ tahun } t - (tahun \ t - 1)}{PAD \text{ tahun } t - 1} \times 100$ Sumber data: BPSDM Prov. NTB

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2024-2026

URUSAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN : Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

TUGAS POKOK :

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD.
- b. Mengembangkan kerja sama dan kemitraan penanggulangan bencana dengan berbagai pihak pemangku kepentingan penanggulangan bencana daerah.
- c. Mengkoordinasikan, mengkomando, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Pengarah dan Pelaksana.
- d. Mengusulkan penetapan keadaan darurat bencana kepada Gubernur.
- e. Menetapkan sistem komando tanggap darurat bencana.
- f. Menerima usul pembentukan komando tanggap darurat bencana dan mengusulkan pembentukan kepada Gubernur.
- g. Mengkoordinasikan mobilisasi sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana daerah.
- h. Menyampaikan laporan penanggulangan bencana kepada Gubernur dan Kepala BNPB.
- i. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD.

FUNGSI :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
- b. Pengorganisasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
(1)	(2)		(3)
Tujuan			
TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN YANG LESTARI DAN ASRI			
Sasaran			
Meningkatnya ketahanan iklim dan ketangguhan menghadapi resiko bencana	Persentase pemenuhan SPM Bencana Daerah	%	Menggambarkan capaian pemenuhan SPM ketentraman dan ketertiban umum Provinsi pada BPBD Formula: $= \frac{\text{Jumlah indikator SPM trantibum yang tercapai}}{\text{Jumlah indikator SPM trantibum}} \times 100$ Sumber data: BPBD Prov. NTB
	Indeks Kapasitas Daerah	point	Menggambarkan Tingkat ketahanan daerah dalam menghadapi bencana Formula:

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
			<p>Dihitung oleh BNPB berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana</p> <p>Sumber data: BNPB</p>
	Cakupan Desa Tangguh Bencana	%	<p>Menggambarkan besaran desa yang memiliki kemampuan mengenali ancaman di wilayahnya sehingga mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana</p> <p>Formula:</p> $= \frac{\text{Jumlah destana}}{\text{Jumlah desa atau kelurahan}} \times 100$ <p>Sumber data: BPBD Prov. NTB</p>
	Indeks Risiko Bencana (IRB)	point	<p>Memberikan informasi mengenai tingkat risiko bencana pada suatu wilayah</p> <p>Formula:</p> $IRB = \frac{\text{Hazard} \times \text{Vulnerabilty}}{\text{Capacity}}$ <p>Sumber data: BNPB</p>

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2024-2026

URUSAN : Penghubung
PEMERINTAH YANG
DILAKSANAKAN

TUGAS POKOK : Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Hubungan Antar Lembaga, Promosi dan Informasi, Pelayanan serta Tata Usaha.

FUNGSI : a. Penyusunan bahan/materi dan Penyusunan kebijakan strategis Penghubung Daerah;
b. Penyusunan bahan kebijakan dan Pelaksanaan tugas dukungan teknis Penghubung Daerah;
c. Penyusunan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Penghubung Daerah;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi Penghubung Daerah; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
(1)	(2)		(3)
Tujuan			
TERWUJUDNYA PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH			
Sasaran			
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik	Tingkat kepuasan pelayanan penghubung	%	Menggambarkan tingkat kepuasan pelayanan yang dilakukan oleh Badan Penghubung Formula: Dihitung berdasarkan survei terhadap pelayanan yg diberikan Badan Penghubung Sumber data: Badan Penghubung Prov. NTB
Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Badan Penghubung (Retribusi)	%	Menggambarkan pertumbuhan pendapatan asli daerah yang bersumber dari Badan Penghubung (Retribusi) Formula: $= \frac{PAD \text{ tahun } t - (tahun \ t - 1)}{PAD \text{ tahun } t - 1} \times 100$ Sumber data: Badan Penghubung Prov. NTB

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2024-2026

URUSAN : Keuangan
 PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN

TUGAS POKOK : Merumuskan bahan/materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/program, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dibidang Keuangan, meliputi Perencanaan dan Pengembangan, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya dan pendapatan daerah lainnya, Pengendalian dan Pembinaan serta Kesekretariatan.

FUNGSI : a. Perumusan bahan/materi dan Penyusunan kebijakan strategis Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 b. Perumusan bahan kebijakan dan Pelaksanaan tugas dukungan teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan
 e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuaidengan tugas dan fungsinya.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
(1)	(2)		(3)
Tujuan			
TERWUJUDNYA PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH			
Sasaran			
Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	Persentase pertumbuhan PAD	%	Menggambarkan pertumbuhan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara keseluruhan ditingkat Pemerintah Provinsi Formula: $= \frac{PAD \text{ tahun } t - (tahun \ t - 1)}{PAD \text{ tahun } t - 1} \times 100$ Sumber data: Bappenda Prov. NTB
Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	Peningkatan Pendapatan transfer	%	Menggambarkan pertumbuhan Penerimaan Pendapatan Transfer secara keseluruhan ditingkat Pemerintah Provinsi Formula: $= \frac{Pendapatan \ Transfer \ tahun \ t - (tahun \ t - 1)}{Pendapatan \ Transfer \ tahun \ t - 1} \times 100$ Sumber data: Bappenda

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
			Prov. NTB
Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	Peningkatan lain-lain pendapatan daerah yang sah	%	<p>Menggambarkan pertumbuhan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah (LLPD) secara keseluruhan ditingkat Pemerintah Provinsi</p> <p>Formula:</p> $= \frac{LLPD \text{ tahun } t - (tahun \ t - 1)}{LLPD \text{ tahun } t - 1} \times 100$ <p>Sumber data: Bappenda Prov. NTB</p>

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2024-2026

URUSAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN : Penelitian dan Pengembangan

TUGAS POKOK : Merumuskan bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/program, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dibidang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, inovasi, pengelolaan kekayaan intelektual, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan sesuai bidang tugasnya sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah.

FUNGSI : a. Perumusan dan penetapan bahan/materi dan Penyusunan kebijakan strategis dan teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, inovasi, pengelolaan kekayaan intelektual, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan sesuai bidang tugasnya;
b. Perumusan program dan kegiatan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, inovasi, pengelolaan kekayaan intelektual, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan sesuai bidang tugasnya;
c. Penyelenggaraan pengoordinasian, Pemantauan, Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, inovasi, pengelolaan kekayaan intelektual, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan sesuai bidang tugasnya;
d. Pelaksanaan tugas dukungan teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, inovasi, pengelolaan kekayaan intelektual, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan sesuai bidang tugasnya;
e. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, inovasi, pengelolaan kekayaan intelektual, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan sesuai bidang tugasnya;
f. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
(1)	(2)		(3)
Tujuan			
TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS MANUSIA YANG KOMPETITIF, UNGGUL, ANDAL DAN TAQWA (KUAT)			
Sasaran			
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Nusa Tenggara Barat yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT)	Persentase peningkatan penerima beasiswa NTB	%	Menggambarkan pertumbuhan jumlah penerima beasiswa dari Pemerintah Provinsi NTB Formula: $= \frac{\text{Jumlah penerima beasiswa tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{\text{Jumlah penerima beasiswa tahun } t - 1} \times 100$ <p>Sumber data: BRIDA Prov. NTB</p>
Tujuan			
TERWUJUDNYA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH			
Sasaran			
Meningkatnya kapabilitas inovasi mendukung peningkatan kinerja industri dan pengembangan ekspor	Jumlah Inovasi dan teknologi yang telah diadopsi dan diterapkan dalam skala industri	unit	Menggambarkan adopsi terhadap inovasi dan teknologi yang dikembangkan di BRIDA dalam proses produksi pada skala industri Formula: $= \frac{\text{Jumlah IT yg diadopsi dlm skala industri}}{\text{Jumlah IT}} \times 100$ <p>Ket.: IT: Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan oleh BRIDA</p> <p>Sumber data: BRIDA Prov. NTB</p>

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA
 BARAT
 TAHUN 2024-2026

URUSAN : Administrasi Pemerintahan
 PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN

TUGAS POKOK : Membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat merumuskan dan menyelenggarakan penyiapan bahan / materi pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar, Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar.

FUNGSI :

- a. Perumusan bahan/materi kebijakan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat;
- b. Perumusan penyusunan rencana/program kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat;
- c. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, Pelayanan administratif , serta pelaporan di bidang Kesejahteraan Rakyat;
- d. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi;

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
(1)	(2)		(3)
Tujuan			
TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS MANUSIA YANG KOMPETITIF, UNGGUL, ANDAL DAN TAQWA (KUAT)			
Sasaran			
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Nusa Tenggara Barat yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT)	Persentase rumah ibadah yang telah dibantu/difasilitasi	%	Menggambarkan besaran jumlah rumah ibadah yang diberikan bantuan oleh Pemerintah Provinsi NTB Formula: $= \frac{\text{Jumlah rumah ibadah yang menerima bantuan}}{\text{Jumlah rumah ibadah}} \times 100$ Sumber data: Biro Kesra Prov. NTB
	Persentase pondok pesantren/lembaga pendidikan agama yang telah dibantu/difasilitasi	%	Menggambarkan besaran jumlah rumah pondok pesantren/lembaga pendidikan agama yang telah dibantu/difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi NTB Formula: $= \frac{\text{Jumlah ponpes atau lembaga pendidikan yang dibantu}}{\text{Jumlah ponpes atau lembaga pendidikan}} \times 100$

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
			Sumber data: Biro Kesra Prov. NTB
	Persentase program distribusi Baznas NTB untuk pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, ekonomi produktif, dakwah dan advokasi	%	<p>Menggambarkan besaran program distribusi Baznas NTB untuk pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, ekonomi produktif, dakwah dan advokasi</p> <p>Formula: $= \frac{\text{Jumlah realisasi anggaran Baznas}}{\text{Jumlah Anggaran Baznas}} \times 100$ </p> <p>Ket.: Anggaran Baznas yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, ekonomi produktif, dakwah dan advokasi</p> <p>Sumber data: Biro Kesra Prov. NTB</p>
Tujuan			
TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN YANG LESTARI DAN ASRI			
Sasaran			
Meningkatnya ketahanan iklim dan ketangguhan menghadapi resiko bencana	Pemilahan sampah madrasah/pondok pesantren	%	<p>Menggambarkan jumlah pasar yang telah melakukan pemilahan sampah</p> <p>Formula: $= \frac{\text{Jumlah Madrasah dan Ponpes yg telah memilah sampah}}{\text{Jumlah Madrasah dan Ponpes}} \times 100$ </p> <p>Sumber data: Biro Kesra Prov. NTB</p>

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT
TAHUN 2024-2026

URUSAN : 1. Pertanahan
 PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN : 2. Administrasi Pemerintahan

TUGAS POKOK : Membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat merumuskan dan menyelenggarakan penyiapan bahan/materi perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerja Sama

FUNGSI : a. Perumusan bahan/materi kebijakan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
 b. Perumusan penyusunan rencana/program kebijakan dan pengoordinasian tugas Perangkat Daerah di bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
 c. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, Pelayanan administratif, pembinaan, serta pelaporan di bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
 d. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
(1)	(2)		(3)
Tujuan			
TERWUJUDNYA PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH			
Sasaran			
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik	Persentase fasilitasi penyelesaian tanah objek reforma agraria (TORA)	%	Menggambarkan besaran jumlah penyelesaian Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Formula: $= \frac{\text{Jumlah TORA yang diselesaikan}}{\text{Jumlah TORA}} \times 100$ Sumber data: Biro Pemerintahan SETDA Prov. NTB
	Cakupan konflik pertanahan yang difasilitasi	%	Menggambarkan besaran jumlah penyelesaian konflik pertanahan Formula: $= \frac{\text{Jumlah konflik pertanahan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah konflik pertanahan}} \times 100$ Sumber data: Biro Pemerintahan SETDA Prov. NTB
	Persentase perjanjian	%	Menggambarkan besaran penyelesaian perjanjian

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
	kerjasama regional dan internasional yang telah diselesaikan dari MoU yang telah disepakati		Kerjasama regional dan internasional dari sejak kesepakatan (MoU) Formula: $= \frac{\text{Jumlah perjanjian kerjasama yang diselesaikan}}{\text{Jumlah MoU kerjasama}} \times 100$ Sumber data: Biro Pemerintahan SETDA Prov. NTB

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2024-2026

URUSAN : Administrasi Pemerintahan
 PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN

TUGAS POKOK : Membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam merumuskan dan menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dan Tatalaksana.

FUNGSI : a. Perumusan bahan/materi kebijakan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang Hukum;
 b. Perumusan penyusunan rencana/program kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Hukum;
 c. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, Pelayanan administratif, pembinaan, serta di bidang Hukum;
 d. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi;

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
(1)	(2)		(3)
Tujuan			
TERWUJUDNYA PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH			
Sasaran			
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik	Persentase penyelesaian pelanggaran produk hukum daerah	%	Menggambarkan jumlah pelanggaran produk hukum daerah yang diselesaikan Formula: $= \frac{\text{Jumlah Pelanggaran Produk hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran produk hukum}} \times 100$ Sumber data: Biro Hukum setda Prov. NTB

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA
 BARAT
 TAHUN 2024-2026

URUSAN : Administrasi Pemerintahan
 PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN

TUGAS POKOK : Membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam merumuskan dan menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah, Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.

FUNGSI : a. Perumusan, penyiapan bahan/materi, dan pengoordinasian kebijakan Daerah di bidang Administrasi Pembangunan;
 b. Perumusan, penyiapan bahan/materi penyusunan rencana/program kebijakan daerah dan tugas Perangkat Daerah di bidang Administrasi Pembangunan;
 c. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif, pembinaan, serta pelaporan di bidang Administrasi Pembangunan;
 d. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi;

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
(1)	(2)		(3)
Tujuan			
TERWUJUDNYA PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH			
Sasaran			
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	point	Menggambarkan kondisi kinerja pelayanan publik yang telah dilakukan Formula: $\text{Nilai Indeks} = \sum (30\% * \text{Kebijakan Pelayanan} + 18\% * \text{Profesionalisme SDM} + 15\% * \text{sarana prasarana} + 15\% * \text{Sistem Informasi Pelayanan Publik} + 15\% * \text{Konsultasi dan Pengaduan} + 7\% * \text{Inovasi})$ Sumber data: Kemenpan RB RI

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA
 TENGGARA BARAT
 TAHUN 2024-2026

URUSAN : Administrasi Pemerintahan
 PEMERINTAH YANG
 DILAKSANAKAN

TUGAS POKOK : Membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam merumuskan dan menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

FUNGSI : a. Perumusan, penyiapan bahan/materi dan pengoordinasian kebijakan Daerah di bidang Pengadaan Barang dan Jasa;
 b. Perumusan, penyiapan rencana/program kebijakan daerah dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pengadaan Barang dan Jasa;
 c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, Pelayanan administratif, serta pelaporan tugas di bidang Pengadaan Barang dan Jasa;
 d. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi;

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
(1)	(2)		(3)
Tujuan			
TERWUJUDNYA PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH			
Sasaran			
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	point	Menggambarkan kondisi kinerja pelayanan publik yang telah dilakukan Formula: $\text{Nilai Indeks} = \sum (30\% * \text{Kebijakan Pelayanan} + 18\% * \text{Profesionalisme SDM} + 15\% * \text{sarana prasarana} + 15\% * \text{Sistem Informasi Pelayanan Publik} + 15\% * \text{Konsultasi dan Pengaduan} + 7\% * \text{Inovasi})$ Sumber data: Kemenpan RB RI

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2024-2026

URUSAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN : Administrasi Pemerintahan

TUGAS POKOK : Membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan merumuskan dan penyiapan bahan/materi kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang Kebijakan Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah.

FUNGSI :

- a. Perumusan bahan/materi kebijakan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang Perekonomian;
- b. Perumusan penyusunan rencana/program kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Perekonomian;
- c. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, Pelayanan administratif, pembinaan, serta pelaporan di bidang Perekonomian;
- d. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi;

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
(1)	(2)		(3)
Tujuan			
TERWUJUDNYA TRANSFORMASI EKONOMI MELALUI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAERAH MENUJU NTB SEBAGAI LOKOMOTIF PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL BALI DAN NUSA TENGGARA YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN			
Sasaran			
Meningkatnya lapangan kerja dan produktivitas daerah	Jumlah Lapangan usaha yang berkembang dari prospektif menjadi unggul	lapangan usaha	Menggambarkan Jumlah lapangan usaha yang berkembang dari prospektif menjadi unggul Formula: Menghitung jumlah lapangan usaha prospektif yang menjadi unggul Sumber data: Analisis BPS Prov. NTB
	Jumlah lapangan usaha yang berkembang dari andal menjadi prospektif	lapangan usaha	Menggambarkan Jumlah lapangan usaha yang berkembang dari andal menjadi prospektif Formula: Menghitung jumlah lapangan usaha andal yang menjadi prospektif Sumber data: Analisis BPS Prov. NTB

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
	Jumlah lapangan usaha yang berkembang dari tertinggal menjadi andal	lapangan usaha	Menggambarkan Jumlah lapangan usaha yang berkembang dari tertinggal menjadi andal Formula: Menghitung jumlah lapangan usaha tertinggal yang menjadi andal Sumber data: Analisis BPS Prov. NTB
Tujuan			
TERWUJUDNYA PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH			
Sasaran			
Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	Persentase peningkatan penerimaan PAD (Retribusi)	%	Menggambarkan pertumbuhan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Biro Perekonomian (Retribusi) Formula: $= \frac{PAD \text{ tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{PAD \text{ tahun } t - 1} \times 100$ Sumber data: Biro Perekonomian SETDA Prov. NTB

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA
 BARAT
 TAHUN 2024-2026

URUSAN : Administrasi Pemerintahan
 PEMERINTAH YANG
 DILAKSANAKAN

TUGAS POKOK : Membantu Asisten Administrasi Umum dalam merumuskan dan menyelenggarakan penyiapan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah, Materi dan Komunikasi Pimpinan serta Protokol.

FUNGSI : a. Perumusan bahan/materi kebijakan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang Administrasi Pimpinan;
 b. Perumusan penyusunan rencana/program kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Administrasi Pimpinan;
 c. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, Pelayanan administratif , pembinaan, serta pelaporan di bidang Administrasi Pimpinan;
 d. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi;

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
(1)	(2)		(3)
Tujuan			
TERWUJUDNYA PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH			
Sasaran			
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik	Capaian prestasi daerah	angka	Menggambarkan jumlah prestasi daerah yang telah dicapai Formula: Menghitung jumlah prestasi yang diterima daerah Sumber data: Biro Adpim SETDA Prov. NTB

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
 TAHUN 2024-2026

URUSAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN : Administrasi Pemerintahan

TUGAS POKOK : Membantu Asisten Administrasi Umum dalam merumuskan dan menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dan Tatalaksana.

FUNGSI : a. Perumusan bahan/materi kebijakan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang Organisasi;
 b. Perumusan rencana/program kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Organisasi;
 c. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, Pelayanan administratif, pembinaan, serta pelaporan di bidang Organisasi;
 d. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi;

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
(1)	(2)		(3)
Tujuan			
TERWUJUDNYA PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH			
Sasaran			
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	point	Menggambarkan kondisi kinerja pelayanan publik yang telah dilakukan Formula: $\text{Nilai Indeks} = \sum(30\% * \text{Kebijakan Pelayanan} + 18\% * \text{Profesionalisme SDM} + 15\% * \text{sarana prasarana} + 15\% * \text{Sistem Informasi Pelayanan Publik} + 15\% * \text{Konsultasi dan Pengaduan} + 7\% * \text{Inovasi})$ Sumber data: Kemenpan RB RI

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2024-2026

URUSAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN : Administrasi Pemerintahan

TUGAS POKOK : Membantu Asisten Administrasi Umum dalam merumuskan dan menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Rumah Tangga, Administrasi Keuangan dan Aset, Tata Usaha.

FUNGSI :

- a. Perumusan bahan/materi kebijakan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang Umum;
- b. Perumusan penyusunan rencana/program kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Umum;
- c. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, Pelayanan administratif, pembinaan, serta pelaporan di bidang Umum;
- d. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi;

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
(1)	(2)		(3)
Tujuan			
TERWUJUDNYA PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH			
Sasaran			
Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	Persentase peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	%	Menggambarkan pertumbuhan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (HPKDYD) Formula: $= \frac{HPKDYD \text{ tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{HPKDYD \text{ tahun } t - 1} \times 100$ Sumber data: Biro Umum SETDA Prov. NTB

INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2024-2026

URUSAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN : Pengawasan

TUGAS POKOK : Merumuskan rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, Penyelenggaraan pemerintahan pada bidang tugas Sekretariat Inspektorat Pembantu I, Inspektorat Pembantu II, Inspektorat Pembantu III, Inspektorat Pembantu IV, dan Inspektorat Pembantu Khusus serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

FUNGSI : a. Perumusan bahan/materi kebijakan strategis urusan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengendalian program dan kegiatan pada lingkup wilayah tugas dan fungsi Sekretariat, Inspektur Pembantu I, II, III, IV dan Inspektorat Pembantu Khusus di lingkup Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat;

b. Penyelenggaraan, pengoordinasian dan perumusan kebijakan implementasi Sistem Pengawasan Internal melalui Audit, Reviu, Asistensi, Pendampingan, Evaluasi Pengendalian, Pembinaan, dan pengawasan lainnya;

c. Penyelenggaraan dan pengoordinasian kebijakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan pemeriksaan khusus/Investigasi;

d. Penyelenggaraan dan pengoordinasian kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/ Kota terkait kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP);

e. Penyelenggaraan, pengoordinasian dan perumusan kebijakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan APIP Inspektorat Provinsi, Inspektorat Jenderal Kemendagri APIP K/L, BPKP dan BPK;

f. Penyelenggaraan, perumusan pengoordinasian dan kebijakan tindak lanjut pengembalian kerugian Negara/ Daerah sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) melalui penagihan, tuntutan ganti rugi/Sidang Majelis tuntutan Ganti Rugi, penyerahan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) dan/atau penyerahan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) sesuai mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. Penyelenggaraan, pengoordinasian, perumusan kebijakan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM), penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB), pengawasan laporan harta kekayaan

- penyelenggara Negara (LHKPN) dan aksi daerah pencegahan korupsi (ADPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- h. Penyelenggaraan, pengoordinasian, perumusan kebijakan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), peningkatan maturitas, peningkatan kapabilitas APIP, pelaksanaan telaahan sejawat, SAKIP, EPPD, LKj1P dan evaluasi/penilaian Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - i. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan revidi dokumen perencanaan, dokumen anggaran, laporan keuangan, laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), perencanaan kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), pengadaan barang dan jasa, realisasi anggaran, dan Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - j. Penyelenggaraan dan pengoordinasian kegiatan pembinaan, supervisi, pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian Inspektorat Provinsi terhadap Kabupaten/Kota;
 - k. Penyelenggaraan, pengoordinasian dan perumusan kebijakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
 - l. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - m. Menyelenggarakan, pengoordinasian dan perumusan kebijakan pencegahan korupsi;
 - n. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian;
 - o. Perumusan RENSTRA, RENJA, RKT, PKPT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan kegiatan Inspektorat;
 - p. Penyerahan dan pendistribusian tugas serta pembinaan, pengarahan, pengawasan dan penilaian kinerja bawahan/jajaran pada Inspektorat; dan
 - q. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
(1)	(2)		(3)
Tujuan			
TERWUJUDNYA PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH			
Sasaran			
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundang-undangan, sumber	Penurunan temuan	%	Menggambarkan penurunan jumlah temuan yang terjadi atas pelanggaran administrasi di daerah Formula: $= \frac{\text{Jumlah temuan (tahun } t - 1) - \text{tahun } t}{\text{Jumlah temuan tahun } t - 1} \times 100$ Sumber data: Inspektorat

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik			Provinsi NTB
	Opini BPK	kategori	Merupakan pernyataan profesional pemeriksa dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan keuangan daerah Formula: Penilaian dilakukan oleh BPK RI dengan 4 kriteria: (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (2) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures); (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern Sumber data: BPK RI

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT
TAHUN 2024-2026

- URUSAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN** : 1. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
2. Kesatuan Bangsa dan Politik
- TUGAS POKOK** : Merumuskan bahan/materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/program, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dibidang di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai peraturan perundang-undangan meliputi : Idiologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Politik Dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Agama dan Organisasi dan Ormas, Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Komplik serta Kesekretariatan
- FUNGSI** : a. Perumusan bahan/materi dan Penyusunan kebijakan strategis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
b. Perumusan Perencanaan program dan kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
c. Penyelenggaraan pengoordinasian, Pemantauan, Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
(1)	(2)		(3)
Tujuan			
TERWUJUDNYA KUALITAS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG MANDIRI			
Sasaran			
Meningkatnya perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial dan inklusi keuangan	Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	%	Menggambarkan besaran jumlah Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Formula: $= \frac{\text{Jumlah penanganan gangguan trantibum}}{\text{Jumlah gangguan trantibum}} \times 100$ Sumber data: Bakesbangpoldagri Prov. NTB
	Persentase pemenuhan SPM ketentraman dan	%	Menggambarkan capaian pemenuhan SPM ketentraman dan ketertiban umum Provinsi

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
	ketertiban umum Provinsi		pada Bakesbangpoldagri Prov. NTB Formula: $= \frac{\text{Jumlah indikator SPM trantibum yang tercapai}}{\text{Jumlah indikator SPM trantibum}} \times 100$ Sumber data: Bakesbangpoldagri Prov. NTB
	Persentase penanganan konflik SARA	%	Menggambarkan besaran jumlah Penanganan konflik SARA Formula: $= \frac{\text{Jumlah penanganan konflik SARA}}{\text{Jumlah konflik SARA}} \times 100$ Sumber data: Bakesbangpoldagri Prov. NTB
Meningkatnya pemerataan pendapatan serta kesejahteraan lahiriah (fisik) dan rohaniah (non fisik)	Indeks Demokrasi	point	Menggambarkan perkembangan demokrasi sehingga diperoleh acuan untuk menyusun program pembangunan politik baik untuk pemerintah pusat maupun daerah Formula: Metode penghitungan Indeks Demookrasi menggunakan triangulasi, yakni mengkombinasikan antara metode penelusuran kuantitatif dan kualitatif, dengan rancangan tertentu sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi (cross validate) data yang didapat dengan metode yang lain. Penilaian terdiri dari aspek kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi Sumber data: BPS Prov. NTB
Tujuan			
TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS MANUSIA YANG KOMPETITIF, UNGGUL, ANDAL DAN TAQWA (KUAT)			
Sasaran			
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Nusa Tenggara Barat yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT)	Persentase kelompok masyarakat yang mengikuti pendidikan karakter bangsa	%	Menggambarkan besaran kelompok masyarakat (asumsi setiap desa terdapat satu kelompok masyarakat) yang telah mengikuti Pendidikan karakter bangsa Formula: $= \frac{\text{Jumlah klp masyarakat yg mengikuti PKB}}{\text{Jumlah klp masyarakat}} \times 100$ Ket.: PKB: Pendidikan Karakter Bangsa Sumber data: Bakesbangpoldagri Prov. NTB
	Cakupan mediator bale mediasi yang dilatih	%	Menggambarkan besaran mediator bale mediasi yang telah mendapatkan pelatihan Formula:

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
			<p>Formula:</p> $= \frac{\text{Jumlah mediator bale mediasi yg mengikuti dilatih}}{\text{Jumlah mediator bale mediasi}} \times 100$ <p>Sumber data: Bakesbangpoldagri Prov. NTB</p>

INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT
TAHUN 2024-2026

URUSAN :
PEMERINTAH YANG
DILAKSANAKAN

TUGAS POKOK : Merumuskan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, pelayanan dan dukungan administratif kepada anggota DPRD koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat DPRD kegiatan Persidangan dan Perundang-undangan, Rapat dan Risalah serta Keuangan.

FUNGSI : a. Perumusan dan penyelenggaraan bahan/materi kebijakan di bidang Kesekretariatan DPRD;
b. Perumusan dan Rencana/Program kebijakan di bidang Kesekretariatan DPRD;
c. Perumusan dan Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD, serta Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
d. Perumusan dan Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
e. Perumusan dan Penyediaan, pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan Oleh DPRD sesuai dengan ketentuan dan kemampuan keuangan daerah;
f. Pelaksanaan pembinaan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
(1)	(2)		(3)
Tujuan			
TERWUJUDNYA PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH			
Sasaran			
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundang-undangan, sumber daya manusia	Indeks Pelayanan Publik	point	Menggambarkan kondisi kinerja pelayanan publik yang telah dilakukan Formula: $\text{Nilai Indeks} = \sum(30\% \times \text{Kebijakan Pelayanan} + 18\% \times \text{Profesionalisme SDM} + 15\% \times \text{sarana prasarana} + 15\% \times \text{Sistem Informasi Pelayanan Publik} + 15\% \times \text{Konsultasi dan Pengaduan} + 7\% \times \text{Inovasi}$ <p>Sumber data: Kemenpan RB RI</p>

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik			

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH